



UNIVERSITAS INDONESIA

**DARI NASIONALISME CINA HINGGA *INDONESIERSCHAP*:
PEMIKIRAN LIEM KOEN HIAN TENTANG KEDUDUKAN
ORANG TIONGHOA DI INDONESIA (1919 – 1951)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

MICHAEL AGUSTINUS

0706279875

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Michael Agustinus

NPM : 0706279875

Tanda tangan : 

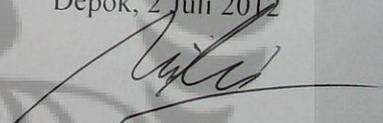
Tanggal : 2 Juli 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 2 Juli 2012



Michael Agustinus

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Michael Agustinus

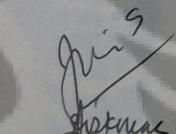
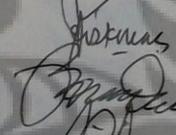
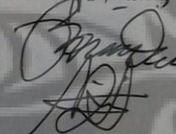
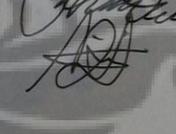
NPM : 0706279875

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul Skripsi : Dari Nasionalisme Cina Hingga *Indonesierschap*:
Pemikiran Liem Koen Hian tentang Kedudukan Orang
Tionghoa di Indonesia (1919 – 1951)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Ita Syamtasyah Ahyat ()
Pembimbing : Tri Wahyuning Mudaryanti, M.Si ()
Penguji : Dr. Bondan Kanumoyoso ()
Panitera : Didik Pradjoko, M.Hum. ()

Ditetapkan di : Depok

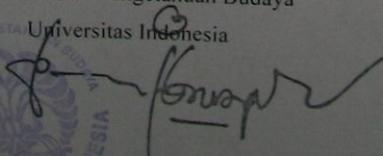
Tanggal : 2 Juli 2012

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196 51023 199003 1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kasih sayangnya, penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana di Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil demi rampungnya masa studi penulis. Rasa terima kasih ini khususnya kepada kedua kakak penulis, Aileen, dan Aime, yang dengan penuh kasih sayang terus memberi semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dari sisi akademis, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada para dosen Program Studi Ilmu Sejarah yang telah membimbing hingga rampungnya skripsi ini. Kepada Tri Wahyuning Mudaryanti, M.Si. sebagai dosen pembimbing, penulis banyak mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan juga arahnya selama pengerjaan tugas akhir ini, mulai dari kelas Bimbingan Bacaan hingga skripsi. Dosen-dosen lain juga sangat berjasa melalui perkuliahan dan diskusi yang mereka berikan selama sepuluh semester ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua dosen di Program Studi Ilmu Sejarah.

Dalam menjalankan penelitian lapangan, penulis sangat berterima kasih kepada para pengurus Perpustakaan FIB UI dan Perpustakaan Nasional atas pelayanannya yang sangat baik. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian lapangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis juga mendapatkan masukan-masukan yang mencerahkan untuk penulisan skripsi ini dari kawan-kawan redaksi majalah Akar, terutama Sulaiman Harahap, penulis haturkan terima kasih.

Kepada kawan-kawan sejarah angkatan 2007 yang telah banyak membantu penulis dengan kebersamaannya penulis sangat amat berterima kasih: Limbong si manusia paling 'jujur', Baim yang mukanya sangat Priuk, Inu yang 4 tahun pulang pergi Bekasi-Depok sampe kurus, Gabe yang mungkin bakal jadi pendeta, Asca yang makin makmur, Bob Obladi, Gilang sang sutradara, Tiko anak kolong, Tyson yang naksir berat sama Tiko, Dody soulmatnya Tiko, Adin si robot

sepakbola, Agung Mapres, Indra alias Bugil, Fahmi yang slangkers sejati, Fikri sejarawan prostitusi, Wahyu yang salah satu raja inses di sejarah, Tely si kiper Timnas, Uphat yang mungkin akan jadi fotografer FHM, Arif birong si kurir narkoba, Rahdil yang cocok masuk ILC, Adel dan Nurul yang selalu bersama, Ambon si wanita serba bisa, Sari yang kecil terus, Amy, Ika, Gem Gem calon ibu rumah tangga yang baik, Rayi yang hobi nonton film, Ines (ditunggu undangannya sama bugil ya nes..), Egar, dan Gadis.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada kawan-kawan mahasiswa sejarah angkatan 2004-2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Akan tetapi nama-nama di bawah ini punya sesuatu yang spesial: Ivan, Franto, Fikri, Bang Arif, Dien, Ria, Isye, Hendaru, Tomo, Gamal, Ano, Ilho, Boik, Fira, Diana, Ridho, Cindy, Oli, Paskaleng, Jack, Fize, Alan, Debby, Rahman, Tituk, Jiung, Koko, Pury, Isna, Raedi, Adit gepeng, Giesta, Annisa, Ableh, Jengkol, Kibo, Raha, Barca, Tama, Nandi, Wanti, Erlan, Martin, serta Agil. Untuk para sahabat penulis di HMPA Edelweiss (Ary, Adit, Bram, dll) yang selalu siap sedia membantu, penulis juga patut menyampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kawan-kawan Komunitas Silat FIB (Norman, Eno, Ana, Daniel, dsb), kawan-kawan BPH BEM FIB 2009 dan 2010, para sahabat di Anggi Foundation, serta rekan-rekan sesama pengajar di Einstein Kelapa Dua atas kebersamaan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Sebagai penutup, kepada EI, penulis tak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas kehangatan dan semangat yang diberikannya selama penulis bergelut merampungkan skripsi ini.

ABSTRAK

Nama : Michael Agustinus
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Dari Nasionalisme Cina Hingga *Indonesierschap*:
Pemikiran Liem Koen Hian tentang Kedudukan Orang
Tionghoa di Indonesia (1919 – 1951)

Skripsi ini membahas pemikiran Liem Koen Hian, salah satu pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI), tentang kedudukan orang Tionghoa di Indonesia. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1919 – 1951. Tahun 1919 adalah tahun ketika Liem mulai aktif menunjukkan pemikiran-pemikiran politiknya, sedangkan 1951 merupakan tahun ketika Liem memutuskan untuk meninggalkan arena politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikirannya mengenai kedudukan orang Tionghoa dipengaruhi oleh kedudukan orang-orang Tionghoa sebagai minoritas perantara di Hindia Belanda dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Dalam pemikiran Liem, kebangsaan Indonesia didasari oleh persamaan kepentingan, nasib, dan cita-cita sehingga tidak mustahil bagi peranakan Tionghoa untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Liem adalah salah satu peletak dasar bagi bergabungnya golongan peranakan Tionghoa dalam kebangsaan Indonesia.

Kata Kunci: sejarah pemikiran, Liem Koen Hian, *Indonesierschap*, kedudukan, orang Tionghoa

ABSTRACT

Name : Michael Agustinus
Major : Historical Science
Title : From Chinese Nationalism until *Indonesierschap*:
Liem Koen Hian's Thought about The Chinese Position in
Indonesia (1919 – 1951)

This thesis is explain Liem Koen Hian's thoughts, one of the founders of Partai Tionghoa Indonesia (PTI), about the Chinese position in Indonesia. The period of this thesis is between 1919 – 1951. On 1919 Liem started active show his political thoughts, therefore 1951 is the year when Liem decide to leave the arena of politic. The result from this study shows that his thoughts about the Chinese position was influenced by the Chinese's position as the middleman minority in Dutch Indische and the development of Indonesian nationalism. In Liem's thoughts, Indonesian nation was based by the similarity of interest, fate, and desire until it is possible for the peranakan Chinese to be a part of Indonesian. On this study also shows that Liem is one of the founders for the peranakan Chinese to gather into the Indonesian.

Key Word: history of idea, Liem Koen Hian, *Indonesierschap*, position, the Chinese

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Agustinus
NPM : 0706279875
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

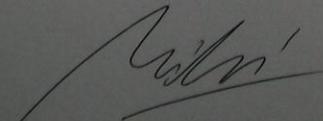
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Dari Nasionalisme Cina hingga Indonesierschap: Pemikiran Liem Koen Hian tentang Kedudukan Orang Tionghoa di Indonesia (1919 – 1951)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 5 Juni 2012
Yang menyatakan



(Michael Agustinus)

GLOSARI

Ambtenaar	Pegawai birokrasi pemerintahan Hindia Belanda
Apartheid	Sistem yang secara tegas membedakan kedudukan setiap kelompok dalam masyarakat berdasarkan ras
Europeanen	Golongan Eropa; salah satu golongan penduduk berdasarkan pembagian yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda
Exorbitante Rechten	Hukum luar biasa; hak istimewa gubernur jenderal Hindia Belanda untuk menangkap, menahan, dan mengasingkan setiap orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban di Hindia Belanda
Indie Weerbar	Milisi Hindia Belanda; milisi yang direncanakan akan dibentuk untuk mempertahankan Hindia Belanda ketika Perang Dunia I berlangsung
Indier Burgerschap	Kekawulanegaraan Hindia Belanda; pemikiran Tjipto Mangunkusumo bahwa semua orang yang menganggap Hindia Belanda sebagai tanah air adalah bangsa Hindia Belanda
Indonesierschap	Kewarganegaraan Indonesia; pemikiran Liem Koen Hian bahwa semua orang yang menganggap Indonesia sebagai tanah air adalah bangsa Indonesia
Inlanders	Golongan pribumi; salah satu golongan penduduk berdasarkan pembagian yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda
Ius Soli	Asas kewarganegaraan yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran
Pacht	Hak pengelolaan gerbang pajak jalan, rumah candu, dan rumah gadai yang diberikan pemerintah kolonial
Passentelsel	Sistem surat pas jalan; kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mewajibkan golongan

	Tionghoa untuk membawa surat pas jalan ketika mengadakan perjalanan keluar dari Pecinan
Persdelict	Tulisan dalam media massa yang melanggar undang-undang
Poenale Sanctie	Undang-undang yang berlaku di luar Jawa yang memberi kuasa kepada pemilik perkebunan untuk menghukum setiap kuli kontrak yang mencoba melarikan diri
Rust en Orde	Keamanan dan ketertiban
Staat	Negara
Thauwchang	Kuncir panjang orang-orang Tionghoa yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah
Volksraad	Dewan rakyat yang dibentuk pemerintah kolonial Hindia Belanda
Vreemde Oosterlingen	Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India); salah satu golongan penduduk berdasarkan pembagian yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda
Wijkenstelsel	Sistem pemukiman; kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang mengharuskan setiap golongan ras tinggal di pemukiman tersendiri

DAFTAR SINGKATAN



CHH	: Chung Hwa Hui
Gerindo	: Gerakan Rakyat Indonesia
HCCH	: Hwa Chiao Chung Hui
HCS	: Hollandsch Chinesche School
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
NIVB	: Nederlandsch Indische Voetbal Bond
PAI	: Partai Arab Indonesia
Parindra	: Partai Indonesia Raya
PBI	: Persatuan Bangsa Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNI-baru	: Pendidikan Nasional Indonesia
PPPKI	: Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Pergerakan Kebangsaan Indonesia
PTI	: Partai Tionghoa Indonesia
PTI-Baru	: Persatuan Tenaga Indonesia
RRC	: Republik Rakyat Cina
THHK	: Tiong Hoa Hwee Koan
WNO	: Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
GLOSARI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	10
1.7 Sistematika Penelitian	11
Bab II Masyarakat Tionghoa peranakan di Jawa era Hindia Belanda hingga Awal Kemerdekaan Indonesia	13
2.1 Wijkenstelsel dan Passenstelsel	13
2.2 Munculnya Organisasi-organisasi Pergerakan Tionghoa di Hindia Belanda	15
2.3 <i>Sin Po</i> : Corong Utama Pendukung Nasionalisme Cina	18
2.4 Chung Hwa Hui: Orientasi Baru ke Hindia Belanda	22
2.5 Berkembangnya Nasionalisme Indonesia dan Lahirnya Partai Tionghoa Indonesia	25
2.6 Zaman Pendudukan Jepang: Akhir dari Pergerakan Tionghoa	27
2.7 Kewarganegaraan Orang Tionghoa di Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan	29
Bab III Pemikiran Politik Awal Liem Koen Hian (1919 – 1926)	31
3.1 Menentang <i>Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap</i>	32
3.2 Nasionalisme Cina	35
Bab IV <i>Indonesierschap</i>: Kedudukan Orang Tionghoa di Negara Indonesia dalam Pemikiran Liem Koen Hian (1927 – 1951)	38
4.1 Situasi Hindia Belanda Pasca 1926	38
4.2 Perubahan Pandangan Liem Koen Hian: Menuju <i>Indonesierschap</i>	40
4.3 <i>Indonesierschap</i>	44
4.4 Partai Peranakan Tionghoa untuk Mewujudkan <i>Indonesierschap</i>	50
4.5 Pilihan Akhir Liem Koen Hian: Tragedi bagi <i>Indonesierschap</i>	56
Bab V Simpulan	59
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nama Liem Koen Hian masih terdengar agak asing dan namanya jarang disebut dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Liem Koen Hian adalah seorang tokoh politik di kalangan Tionghoa¹ peranakan pada era 1930-an, pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang berorientasi ke Indonesia. PTI adalah partai yang ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan dianggap sebagai pelopor dari ‘gerakan asimilasi’. Hingga saat penelitian ini dibuat, belum ada penelitian yang komprehensif mengenai pemikiran Liem Koen Hian. Sebuah karya penelitian awal mengenai Liem Koen Hian pernah dibuat oleh Leo Suryadinata dalam majalah *Prisma* tahun 1983. Penelitian ini tidak akan banyak berkuat pada soal-soal peristiwa tetapi lebih menitikberatkan perhatian pada pemikiran Liem Koen Hian sebab tema sejarah pemikiran penting untuk ditulis karena dari situlah kita bisa mendapati suatu gambaran utuh tentang masa lalu: sejarah bukan hanya peristiwa yang muncul karena berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi dan mempengaruhi pemikiran manusia.

Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa sejarah pemikiran atau sejarah intelektual mengkaji semua fakta yang bersumber dari pikiran, ide, kepercayaan, angan-angan, dan segala unsur kesadaran dalam diri manusia. Sejarah pemikiran juga mengungkap latar belakang sosial-kultural masyarakat, lingkungan keluarga tempat tokoh itu hidup sehingga diperoleh gambaran yang sangat jelas tentang faktor-faktor sosial-kultural yang mempengaruhi pemikirannya.²

¹ Istilah Tionghoa digunakan dalam tulisan ini untuk menyebut orang-orang Cina pada abad ke-20 karena istilah inilah yang digunakan sebagai identitas oleh orang Cina di Indonesia sejak awal abad ke-20. Istilah ini dipopulerkan oleh pers Melayu-Tionghoa pada awal abad ke-20. Untuk periode sebelum abad ke-20 digunakan istilah Cina. Istilah Cina juga digunakan untuk menyebut negara Cina (bukan etnis) karena Cina adalah nama resmi negara tersebut sejak kemerdekaannya pada 1911, lihat Melly G. Tan, “Ethnic Chinese in Indonesia,” *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 1-2.

² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 176-177.

Sementara Crane Brighton berpendapat bahwa sejarah intelektual adalah sejarah yang mempunyai data apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia sebagai pokok masalah. Dengan demikian sejarah intelektual bukan saja suatu ringkasan atau sintesa dari data; tetapi juga mencoba mengerti hubungan antara ide pada satu pihak dan pada lain pihak “kecenderungan” (*drives*) dan “kepentingan” (*interest*), serta faktor-faktor nonintelektual pada umumnya, dalam sosiologi perorangan dan masyarakat.³

Berkaitan dengan hal tersebut pemikiran Liem Koen Hian perlu diangkat dan diketahui karena dari situlah akan diperoleh gambaran yang lebih lengkap bagaimana sebenarnya pemikiran Liem Koen Hian dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemikirannya. Sebelum membahas pemikiran Liem Koen Hian, terlebih dahulu akan dijelaskan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia hingga pertengahan abad ke-20 untuk menggambarkan suasana zaman yang melatarbelakangi pemikiran Liem Koen Hian.

Orang-orang Cina di Nusantara sudah datang jauh sebelum Belanda datang ke Nusantara.⁴ Berdasarkan kronik dari Dinasti Han, ternyata Cina telah mengenal Nusantara yang disebut Huang-tse. Menurut catatan yang ada, orang-orang Cina mulai berdatangan ke Nusantara pada abad ke-9, yaitu pada zaman Dinasti Tang untuk berdagang dan mencari kehidupan baru.⁵ Bukti-bukti sejarah menunjukkan adanya pemukiman keluarga-keluarga besar Tionghoa di Jawa Timur selama berabad-abad. Ketika Surabaya masih merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, orang-orang Tionghoa sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial kota tersebut. Mereka berperan sebagai pedagang beras dan bertempat tinggal di sebelah utara keraton.⁶ Pada abad ke-14 di sepanjang Pantai Utara Jawa, masyarakat-masyarakat pedagang bangsa Cina telah mengukuhkan diri mereka dan nampaknya telah melangsungkan sejumlah perkawinan dengan penduduk setempat. Bahkan, pada puncak kejayaan Kerajaan Majapahit, beberapa orang pegawai kecil (para penjaga gerbang pajak jalan), para awak perahu serta

³ Crane Brighton, “Sejarah Intelektual,” *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, ed. Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 201.

⁴ Onghokham, “Etnis Cina di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah,” *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 1.

⁵ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm. 18-19.

⁶ Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 37.

pedagang-pedagang yang terdapat di sepanjang sungai Brantas, nampaknya adalah orang-orang Cina.⁷

Sejak lama golongan Tionghoa dimanfaatkan sebagai “perantara” sekaligus “mesin pencetak uang”⁸, baik oleh raja-raja maupun penguasa kolonial di Indonesia.⁹ Meskipun begitu, struktur masyarakat Tionghoa di Indonesia baru berkembang setelah kedatangan kolonialis Belanda ke Indonesia.¹⁰ Belanda yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia melihat bahwa Tionghoa bisa menjadi “perantara” antara mereka dengan golongan bumiputra. Untuk itu, Belanda menjual berbagai macam *pacht* (hak pengelolaan) pajak jalan, candu, rumah gadai, kepada pengusaha Tionghoa. Dengan dukungan penguasa, para *pachter* tersebut memeras rakyat dan menjadi sangat kaya karena kedudukannya. Oleh karena itu, golongan Tionghoa diposisikan menjadi minoritas perantara yang kedudukan ekonominya cukup mapan, namun secara politis dibenci oleh rakyat.¹¹

Salah satu politik pemerintah Hindia Belanda adalah yang disebut sistem *apartheid*.¹² Dengan sistem ini, masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi tiga golongan: (1) golongan Eropa atau Belanda, (2) golongan Timur Asing, termasuk Cina, Arab, India, dan seterusnya, dan (3) golongan bumiputra. Sistem *apartheid* ini mengisolasi setiap golongan penduduk yang satu dari golongan penduduk yang lain secara fisik. Setiap golongan penduduk diharuskan tinggal di kampung-kampung tersendiri.¹³ Pola pemukiman tersebut mengakibatkan timbulnya penetapan sistem wilayah yang dalam bahasa Belanda disebut *wijkenstelsel*. Selain itu orang-orang Cina yang ingin berpergian keluar pemukiman mereka

⁷ Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 11-12.

⁸ Sebagai contoh, di berbagai pelabuhan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara banyak sekali syahbandar (pejabat pelabuhan yang menyambut kapal asing) keturunan Cina, lihat Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17* (Jakarta, 2008), hal 102-112.

⁹ Peter Carey, *Op. Cit.*, hal. x.

¹⁰ Onghokham, “Kapitalisme Cina di Hindia Belanda,” *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 55.

¹¹ Peter Carey, *Op. Cit.*, hlm. x.

¹² Sistem *apartheid* adalah sistem yang secara tegas membedakan kedudukan setiap kelompok dalam masyarakat berdasarkan ras, lihat Anton M. Moeliono, *ed., et. al., Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 45.

¹³ Onghokham, “Etnis Cina di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah,” *loc. cit.*, hlm. 3-4.

diharuskan membawa surat izin yang membatasi kebebasan bergerak mereka (*passenstelsel*).¹⁴

Pada awalnya *wijkenstelsel* (sistem pemukiman) dan *passenstelsel* (sistem pas jalan) bukanlah masalah yang berarti bagi orang-orang Cina karena peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku bagi para pemegang *pacht* dan para pegawainya. Peraturan wajib tinggal dan pas jalan tidak diberlakukan bagi aktivitas perdagangan candu, karena perdagangan ini sangat menguntungkan baik bagi orang Tionghoa maupun penguasa Belanda.¹⁵ Peraturan ini segera memicu reaksi keras dari orang-orang Cina ketika pemerintah kolonial menghapus aturan *pacht*.¹⁶ Dihapuskannya *pacht* pada akhir abad ke-19 mempersempit lahan pekerjaan di bidang perdagangan bagi orang-orang Cina.¹⁷ Dengan demikian orang-orang Cina menjadi sangat dirugikan oleh kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*.

Dari ketidakpuasan golongan Tionghoa ini, timbul pergerakan orang-orang Tionghoa pada permulaan abad ke-20. Tuntutan pertama mereka adalah mengakhiri sistem pas jalan dan sistem pemukiman, memberikan pada orang-orang Tionghoa keleluasaan bertempat tinggal dan bergerak. Pas jalan dan pemisahan pemukiman ini merupakan penghalang bagi kebebasan bergerak orang Tionghoa dan terutama bagi kegiatan dagang mereka.¹⁸ Pada saat yang bersamaan, ketika peraturan pemerintah Hindia Belanda semakin ketat, Cina mulai menaruh perhatian terhadap orang-orang Tionghoa di perantauan. Pada 1892 kaisar Cina membicarakan soal emansipasi dari orang-orang Tionghoa di Hindia dengan pemerintah Belanda. Contoh lain dari perhatian negeri Cina itu antara lain pengiriman kapal-kapal perang Cina dengan seorang duta, pengiriman inspektur-inspektur pengajaran, pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah Tionghoa

¹⁴ Onghokham, "Terjadinya Suatu Minoritas," *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, ed. J. J. Rizal (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 41.

¹⁵ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 84.

¹⁶ *Pacht* adalah kontrak pengelolaan gerbang pajak jalan, rumah candu, dan rumah gadai yang lazim diberikan pemerintah kolonial kepada golongan Tionghoa, lihat Peter Carey, *Op. Cit.*, hlm. x.

¹⁷ Mely G. Tan, "Chinese Business in Indonesia," *Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 117.

¹⁸ Robert Van Niel, *Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2010), hlm. 132.

Hwee Koan (THHK), serta pemberian kemungkinan untuk belajar di Cina.¹⁹ Di tahun-tahun inilah nasionalisme Cina menyebar ke seluruh Asia Tenggara, termasuk ke Hindia Belanda.

Terdorong oleh sikap baru yang berasal dari negeri leluhur Cina di akhir abad kesembilan belas dan dipercepat oleh suatu bayangan akan negeri Cina yang kuat yang akan menaruh perhatian besar terhadap Tionghoa perantauan, orang-orang Tionghoa mulai menuntut perbaikan nasib mereka.²⁰ Perhimpunan-perhimpunan Tionghoa didirikan, salah satunya adalah Tionghoa Hwee Koan yang berdiri pada 1900.²¹ Secara umum, pergerakan orang-orang Tionghoa menuntut persamaan hak dengan orang-orang Eropa, terutama yang menyangkut undang-undang hukum pidana. Orang-orang Jepang dan Thailand mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan orang Eropa di Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa Jepang dan Thailand adalah negara-negara modern sedangkan Cina belum mencapai taraf itu. Jadi, kini harapan orang-orang Tionghoa Hindia Belanda mengarah ke Cina sebab jika Cina menjadi negara modern seperti halnya Jepang maka kedudukan mereka akan terangkat.²²

Di tengah suasana berkembangnya organisasi-organisasi pergerakan Tionghoa inilah muncul seorang tokoh politik peranakan Tionghoa bernama Liem Koen Hian. Pada Desember 1918, Liem diangkat menjadi pemimpin redaksi *Sinar Soematra* (di Padang) dan setelah itu mulai menunjukkan pemikiran-pemikiran politiknya.

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemikiran politik Lim Koen Hian pada kurun waktu antara 1919 ketika Liem mengawali karir politiknya sebagai pemimpin redaksi *Sinar Soematra* dan 1951 ketika ia memutuskan untuk meninggalkan arena politik. Dalam surat kabar *Sinar*

¹⁹ Onghokham, "Chung Hwa Hui, PTI dan Indonesia Merdeka," *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, ed. J. J. Rizal (Jakarta, 2005), hlm. 129.

²⁰ Robert Van Niel, *Op. Cit.*, hlm. 131.

²¹ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 89.

²² Onghokham, "Refleksi Seorang Peranakan Mengenai Sejarah Cina Jawa," *loc cit.*, hlm. 158.

Soematra, Soeara Poebliék, dan Sin Tit Po Liem Koen Hian banyak membuat opini mengenai kedudukan orang Tionghoa di Hindia Belanda dan bayangannya mengenai kedudukan orang Tionghoa di negara Indonesia yang merdeka. Kedudukan dan orientasi orang Tionghoa menjadi permasalahan penting pada masa itu akibat kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa. Berkembangnya nasionalisme Indonesia memberikan orientasi baru bagi Liem Koen Hian, ia ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memikirkan bagaimana kedudukan orang Tionghoa di dalam negara Indonesia yang dalam keyakinannya akan merdeka. Untuk menjawab permasalahan tersebut, serangkaian pertanyaan penelitian akan diajukan, antara lain:

- Bagaimana suasana zaman yang melatarbelakangi pemikiran politik Liem Koen Hian?
- Bagaimana perkembangan pemikiran politik Liem Koen Hian dari nasionalis Cina menjadi nasionalis Indonesia?
- Bagaimana pengaruh pemikiran Liem Koen Hian pada masyarakat Tionghoa peranakan di Indonesia?
- Faktor-faktor apa yang menyebabkan Liem Koen Hian melepaskan kewarganegaraan Indonesia pada 1951?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran politik Liem Koen Hian mengenai kedudukan etnis Tionghoa di Indonesia. Liem Koen Hian adalah seorang Tionghoa peranakan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang Indonesia dan ikut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akan sangat menarik untuk mengkaji kedudukan etnis Tionghoa sebagai bagian dari negara Indonesia merdeka yang multikultural dalam bayangannya serta pengaruh dari pemikirannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyumbangkan sebuah hasil penelitian baru dari sebuah topik yang jarang mendapatkan perhatian

sehingga penelitian-penelitian atas topik serupa di masa yang akan datang sudah memiliki referensi.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara khusus akan membahas pemikiran politik Liem Koen Hian pada kurun waktu 1919 - 1951. Tahun 1919 dipilih sebagai tonggak awal karena pada tahun tersebut Lim Koen Hian diangkat menjadi pemimpin redaksi *Sinar Soematra*, sejak itulah Liem Koen Hian mulai aktif menunjukkan pemikiran-pemikiran politiknya. Tahun 1951 dipilih sebagai akhir periode karena pada Oktober 1951 Liem Koen Hian memutuskan untuk meninggalkan arena politik dan melepaskan kewarganegaraan Indonesia setelah ia dibebaskan dari penjara akibat razia Agustus yang diadakan oleh kabinet Sukiman.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang dianggap relevan untuk merekonstruksi kembali peristiwa seperti pelaku sejarah, koran sejaman, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Buku *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825* yang merupakan terjemahan asli dari *Changing Javanese Perceptions of The Chinese Communities in Central Java, 1755-1825* merupakan hasil penelitian Peter Carey mengenai peranan orang-orang Tionghoa sebagai pedagang perantara dalam masyarakat kolonial. Kedatangan orang-orang Tionghoa sebelum masa kolonialisme di nusantara juga diceritakan dalam buku ini.

Andjarwati Noordjanah, seorang sejarawan dari Universitas Gajah Mada (UGM), pernah membuat skripsi mengenai sejarah komunitas Tionghoa di Surabaya. Skripsinya yang kemudian diterbitkan oleh Ombak menjadi sebuah buku berjudul *Komunitas Tionghoa di Surabaya* berisi tentang sejarah komunitas Tionghoa di kota Surabaya. Surabaya adalah salah satu pusat dari organisasi pergerakan Tionghoa, tempat Liem Koen Hian aktif sebagai pemimpin redaksi *Sin*

Universitas Indonesia

Tit Po, dan kota tempat berdirinya PTI. Buku ini menceritakan sedikit mengenai aktivitas organisasi-organisasi pergerakan Tionghoa di Surabaya, termasuk PTI yang didirikan oleh Liem Koen Hian.

Onghokham adalah salah satu sejarawan yang sangat ahli mengenai sejarah orang-orang Tionghoa di Indonesia. Tulisan-tulisannya mengenai sejarah orang Tionghoa di Indonesia yang tersebar di berbagai media massa dihimpun dalam buku *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*. Ada 11 tulisan Onghokham dalam buku ini. Beberapa diantaranya membahas mengenai sejarah kedatangan orang Tionghoa ke nusantara, peranan orang Tionghoa sebagai perantara dalam masyarakat kolonial, dan organisasi-organisasi pergerakan Tionghoa.

Selain buku *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, tulisan-tulisan Onghokham mengenai masalah ke-Tionghoa-an juga dihimpun dalam buku *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Ada 14 tulisan karya Onghokham yang pernah dimuat dalam majalah *Star Weekly* di buku ini. Tulisan-tulisan dalam buku ini dibuat ketika terjadi polemik mengenai masalah asimilasi orang-orang Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia. Onghokham sebagai pendukung kebijakan asimilasi membuat berbagai tulisan yang membahas sejarah orang Tionghoa untuk mendukung asimilasi. Beberapa tulisannya membahas mengenai organisasi-organisasi pergerakan Tionghoa. Konsep *Indonesierschap* yang digagas oleh Liem Koen Hian sedikit disinggung dalam buku ini.

Leo Suryadinata seperti halnya Onghokham, juga merupakan salah seorang peneliti yang sangat peduli pada masalah integrasi orang Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia. Buku karyanya yang berjudul *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* membahas seputar gerakan-gerakan orang Tionghoa yang timbul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Liem Koen Hian dan PTI masuk dalam pembahasan beberapa bab dalam buku ini.

Biografi delapan tokoh Tionghoa yang paling historis dalam bidang hukum, jurnalistik, sastra dan keagamaan yang besar artikulasinya dalam menyuarkan nasionalisme Indonesia dituliskan oleh Leo Suryadinata dalam *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam*

Hien. Kehidupan beberapa tokoh penting gerakan-gerakan orang Tionghoa beserta pemikirannya dibahas dalam buku ini, diantaranya adalah Tjoe Bou San yang merupakan salah satu corong golongan *Sin Po* dan Lim Koen Hian yang tak lain adalah penggagas konsep *Indonesiërschap*. Buku ini merupakan sumber penting untuk mengetahui perjalanan hidup dan pemikiran Liem Koen Hian. Perbedaan penelitian ini dengan karya Leo Suryadinata adalah penelitian ini tidak terlalu fokus pada kehidupan Liem Koen Hian dan akan membahas pemikiran Liem Koen Hian mengenai kedudukan etnis Tionghoa di Hindia Belanda, etnis Tionghoa di negara Indonesia, dan negara Indonesia merdeka dalam bayangan Liem Koen Hian yang belum dikaji secara luas dalam karya Leo Suryadinata.

Satu lagi karya Leo Suryadinata yang penting bagi penelitian ini adalah *Dilema Minoritas Tionghoa*. Dalam karyanya ini, Leo Suryadinata menjelaskan posisi orang-orang Tionghoa dalam masyarakat kolonial yang mendasari pemikiran mereka. Dari karya ini dapat diketahui latar belakang pemikiran Liem Koen Hian. Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tionghoa juga dapat diketahui melalui karya ini.

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai suasana zaman Indonesia pada kurun waktu ketika Liem Koen Hian menciptakan pemikiran-pemikiran politiknya, penulis menggunakan buku *Sejarah Indonesia Modern* karya M. C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern* berisi peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak abad ke-13 hingga abad ke-20. *Sejarah Indonesia* pada masa pergerakan nasional, pendudukan Jepang, dan masa awal kemerdekaan Indonesia yang melatarbelakangi pemikiran-pemikiran Liem Koen Hian dibahas secara umum dalam buku ini.

Karya Robert van Niel yang berjudul *Elite Modern Indonesia* digunakan pula dalam penelitian ini sebagai sumber untuk mengetahui kebijakan pemerintah kolonial secara umum selama awal abad ke-20. Buku ini penting untuk mengetahui suasana zaman yang melatarbelakangi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan Tionghoa.

1.6 Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian secara lengkap dan operasional sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka diperlukan serangkaian data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang meliputi empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Pada tahap heuristik dilakukan pengumpulan data yang dapat digunakan sebagai sumber penulisan. Data-data diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk menelusuri data baik primer maupun sekunder dari instansi yang terkait, dan atau hasil studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai Liem Koen Hian. Melalui cara tersebut diharapkan dapat diungkapkan latar belakang penelitian ini.

Dalam penelitian ini dipergunakan sumber-sumber primer berupa artikel surat kabar yang sejaman seperti *Djawa Tengah*, 1932, *Keng Po*, 1925, *Mata Hari*, 1934, *Sin Tit Po*, 1930, 1932, 1938, *Sinar Sumatra*, 1919, dan *Soeara Publiek*, 1927, 1928. Di samping sumber-sumber primer, digunakan juga sumber sekunder. Sumber sekunder yang dipakai berupa buku-buku dan artikel seperti karya Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, dan Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Dengan mempergunakan karya-karya sekunder, dapat diperoleh tambahan data untuk mengkaji permasalahan yang diajukan.

Setelah memperoleh data-data yang relevan dengan tema penelitian yang tengah digarap, maka dilakukan pengujian terhadap data atau sumber-sumber sejarah tersebut. Taraf pengujian tersebut dikenal sebagai tahap kritik, yaitu suatu tahap yang dilakukan untuk memperoleh fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian di *check* kebenarannya dengan jalan membandingkan dengan buku atau sumber lain. Misalnya karya Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya*, Yogyakarta, Ombak, 2010, dibandingkan dengan sumber-sumber yang diperoleh dari *Sin Tit Po*.

Untuk menguji keotentikan sumber yang diperoleh, antara lain dengan melakukan analisa sumber dan kritik teks terhadap dokumen yang didapat. Melalui analisa sumber dapat dilacak apakah sumber tersebut asli atau turunan, sehingga dapat digunakan dalam penulisan ini. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern dengan cara melakukan kritik intrinsik, yaitu menentukan sifat sumber-sumber itu. Berbagai fakta yang diperoleh harus dirangkai dan dihubungkan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Peristiwa yang satu harus dimasukan dalam keseluruhan konteks peristiwa lain yang melingkupinya. Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah, karena tidak semua fakta dapat dimasukan. Dalam hal ini hanya fakta yang relevan yang dapat disusun menjadi kisah sejarah. Faktor periodisasi dari sejarah juga termasuk dalam proses interpretasi ini, karena dalam kenyatannya peristiwa yang satu disusul dengan peristiwa yang lain tanpa batas dan putus-putus. Akan tetapi di dalam historiografi biasanya diadakan pembagian atas periode-periode yang diperinci oleh hal-hal yang khas.

1.7 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Permasalahan Penelitian, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian. Bab ini merupakan pengantar untuk menggambarkan isi dari penelitian ini.

Bab II Masyarakat Tionghoa Peranakan di Jawa Era Hindia Belanda hingga Awal Kemerdekaan Indonesia akan menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan Tionghoa, pemikiran-pemikiran yang mendasari dan tokoh-tokohnya, peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat Tionghoa peranakan pada masa ini, serta kebijakan pemerintah Indonesia terhadap orang Tionghoa di awal kemerdekaan.

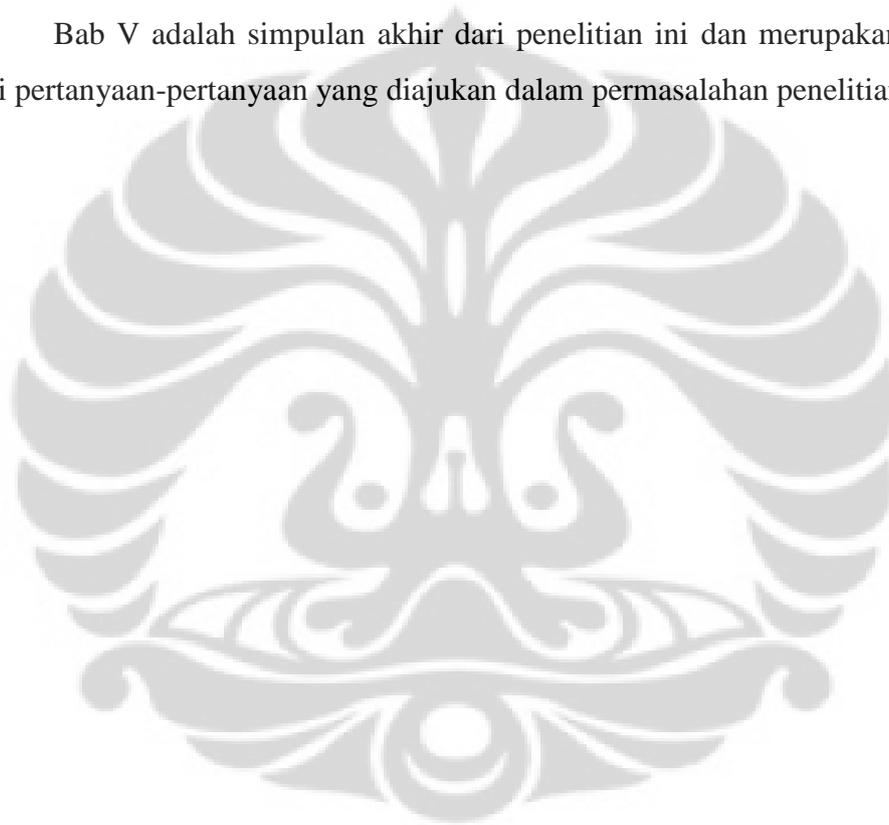
Bab III Pergulatan Pemikiran Liem Koen Hian: dari Nasionalisme Cina Menuju Nasionalisme Indonesia (1919 – 1926) berisi pemikiran-pemikiran politik

Universitas Indonesia

awal Liem Koen Hian, pemikiran-pemikiran yang mempengaruhinya, dasar-dasar pemikirannya pada periode ini, dan suasana zaman yang melatarbelakanginya.

Bab IV *Indonesiërschap*: Kedudukan Orang Tionghoa di Negara Indonesia dalam Pemikiran Liem Koen Hian (1927 – 1951) memaparkan perubahan orientasi Liem Koen Hian dari nasionalis Cina menjadi nasionalis Indonesia, isi konsepsi *Indonesiërschap*-nya, pemikiran yang mempengaruhinya, peristiwa serta suasana zaman yang mempengaruhinya, pemikiran Liem mengenai partai peranakan Tionghoa, serta pilihan akhirnya.

Bab V adalah simpulan akhir dari penelitian ini dan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan penelitian.



BAB II

MASYARAKAT TIONGHOA PERANAKAN DI JAWA ERA HINDIA BELANDA HINGGA AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA

2.1 *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*

Salah satu politik dari Hindia Belanda adalah yang disebut sistem *apartheid*.²³ Dalam *Regering Reglement* tahun 1854 penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu golongan orang Eropa (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), dan Bumiputra (*Inlanders*). Setiap golongan tersebut dibedakan hak dan kedudukannya dalam masyarakat. Orang-orang Cina masuk dalam kelompok Timur Asing bersama orang India, Arab, dan Melayu.²⁴

Sistem *apartheid* ini diterapkan di suatu masyarakat yang mengisolasi setiap golongan penduduk yang satu dari golongan penduduk yang lain secara fisik. Sistem ini mengharuskan penduduk tinggal di kampung-kampung tersendiri. Kebijakan inilah yang dinamakan *wijkenstelsel* (sistem perkampungan). Peraturan kampung Cina pada awalnya diberlakukan untuk melindungi orang-orang Tionghoa dari sentimen-sentimen anti Cina dan pemberontakan orang-orang Cina terhadap pemerintah kolonial. Peristiwa pembantaian orang-orang Cina di Batavia tahun 1740 dan Perang Cina tahun 1742 mendorong pemerintah kolonial membuat peraturan tersebut.²⁵ Namun *wijkenstelsel* pada abad ke-19 memiliki alasan yang berbeda. Dalam *Staatsblad* tahun 1835 No. 37 dinyatakan bahwa sebab pertama adalah untuk menghindari tercampurnya (*almagatie*) berbagai bangsa di Jawa. Alasan lain yang membuat pemerintah memperkeras pelaksanaan peraturan tersebut adalah kekhawatiran Belanda bahwa orang-orang Cina dan bumiputra akan bersatu menentang pemerintah Belanda. Kekhawatiran tersebut memang berdasar. Terbukti dalam kerjasama antara seorang Cina bernama Boen Seng dengan Raden Prawira Sentana, yang membahayakan keamanan Yogyakarta.

²³ Onghokham, "Etnis Cina di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah," *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 3.

²⁴ Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 82.

²⁵ Mona Lohanda, *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hlm. 243.

Mulai tahun 1835, pelaksanaan peraturan kampung Cina diperkeras. Peraturan mengenai kampung Cina juga dicantumkan dalam berbagai peraturan pemerintah Hindia Belanda, yakni dalam peraturan tahun 1818, 1827, dan 1854. Orang-orang Cina dikumpulkan dalam kampung-kampung mereka sendiri dan diperintah oleh kepala-kepala mereka sendiri.²⁶ Sejak awal abad ke-19 hingga akhir masa kolonial, orang-orang Cina dipimpin oleh opsir yang tingkatannya secara berurutan digolongkan sebagai *Majoor*, *Kapitein*, *Luitenant*, dan *Wijkmeester*. Di kota-kota besar seperti Batavia, para opsir bersama-sama membentuk sebuah Dewan Cina atau *Kongkoan*.²⁷

Untuk mengadakan perjalanan dari kampung Cina ke kampung Cina yang lain atau ke kampung etnis lain, diperlukan surat pas jalan. Kebijakan ini dinamakan *passenstelsel* dan diberlakukan sejak 1816. *Passenstelsel* sangat merepotkan orang Cina karena prosedur untuk mendapatkan sehelai kartu pas sulit dan membutuhkan waktu yang panjang, hanya untuk mendapatkan stempel mereka harus menunggu berjam-jam. Walau niat pemerintah kolonial adalah untuk mengawasi gerak-langkah penduduk, tetapi tersembunyi pula niat untuk mencegah hubungan komunikasi yang intens antara warga Cina dengan penduduk setempat.²⁸

Selain itu dalam hal penampilan fisik juga harus berbeda. Sebagai kelompok masyarakat asing, orang-orang Cina dilarang menghilangkan ciri khas dan tanda fisik yang melekat pada dirinya. Kuncir panjang (*thauwcang*) yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah harus tetap dipelihara, dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian khas Cina. Merupakan pelanggaran kriminal apabila mereka tampil di depan umum dengan menggunakan pakaian lain.²⁹ Pada tahun 1851 seorang pengelana Jerman yang bernama Gerstacker mencatat bahwa orang-orang Cina telah mencoba untuk mengubah penampilan mereka, namun

²⁶ Onghokham, "Terjadinya Suatu Minoritas," *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, ed. J. J. Rizal (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 41.

²⁷ Onghokham, "Keluarga-Keluarga Opsir Peranakan di Jawa," *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 171.

²⁸ Mona Lohanda, *Op. Cit.*, hlm. 241.

²⁹ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 82.

mereka dilarang melakukan hal tersebut oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.³⁰

2.2 Munculnya Organisasi-Organisasi Pergerakan Tionghoa di Hindia Belanda

Hingga menjelang akhir abad ke-19, *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* tak demikian terasa oleh para pemegang dan pegawai *pacht*, karena sebagai pemegang atau pegawai *pacht* seseorang dapat bergerak dengan agak bebas atau tinggal di pedalaman, yang memungkinkan mereka berdagang, dapat menjadi perantara antara produsen dan konsumen.³¹ Sistem *pacht* memang merupakan sumber pendapatan penting bagi orang-orang Cina. Perdagangan candu misalnya merupakan sumber kehidupan orang-orang Cina waktu itu.³² Ada beberapa peristiwa yang mendorong timbulnya pergerakan Tionghoa di Hindia Belanda.

Pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan Politik Etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan bumiputra. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memandang bahwa kegiatan dagang orang-orang Cina di daerah-daerah pedesaan yang dihuni penduduk bumiputra harus dibatasi secara ketat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk bumiputra sebab orang-orang Cina dianggap memiskinkan rakyat bumiputra melalui penjualan candu, usaha rumah gadai, dan kredit. Sistem *pacht* dihapus. *Wijkenstelsel* dan *passenstelsel* diterapkan dengan ketat.³³ Dihapuskannya *pacht* pada akhir abad ke-19 mempersempit lahan pekerjaan di bidang perdagangan bagi orang-orang Tionghoa, padahal perdagangan adalah lapangan pekerjaan utama mereka.³⁴ Lapangan pertanian tertutup bagi orang-orang Tionghoa dengan adanya Undang-Undang Agraria

³⁰ Kees van Dijk, "Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi," *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, ed. Henk Schulte Nordholt (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 68.

³¹ Onghokham, "Chung Hwa Hui, PTI dan Indonesia Merdeka," *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, ed. J. J. Rizal (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 126.

³² Onghokham, "Gerakan Cina," *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta, 2008), hlm. 110.

³³ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 22.

³⁴ Onghokham, "Chung Hwa Hui, PTI dan Indonesia Merdeka," *loc. cit.*, hlm. 126.

1870.³⁵ Mereka juga tidak dapat menjadi *ambtenaar* karena sektor birokrasi pemerintahan tertutup bagi golongan Tionghoa.³⁶

Selama kurun waktu yang sama, nasionalisme Cina telah menyebar di seluruh Asia Tenggara. Sebuah kelompok pembaharu di Cina yang gagal dalam usahanya menjadikan Cina sebagai suatu kerajaan konstitusional mencari perlindungan di berbagai negeri Asia Tenggara, dan menggunakan Singapura sebagai pangkalan baru bagi kegiatannya. Pengaruh paham mereka menyebar hingga ke Jawa yang letaknya berdekatan dengan Singapura.³⁷ Di saat yang sama ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menekan orang-orang Cina dengan berbagai peraturan, negeri Cina mulai menaruh perhatian kepada orang-orang Cina di Hindia Belanda. Pada 1892 kaisar Cina membicarakan soal emansipasi orang-orang Cina di Hindia Belanda dengan pemerintah Belanda. Perhatian lainnya terlihat dari pengiriman kapal-kapal perang Cina dengan seorang duta, pengiriman inspektur-inspektur pengajaran, pemberian kemungkinan untuk belajar di Negeri Cina, dan lain-lain.³⁸ Satu identifikasi baru dengan nasion Cina timbul dan nasionalisme Cina mulai tumbuh di kalangan orang-orang Cina Hindia Belanda.

Satu kejadian lain yang juga mendorong munculnya pergerakan Tionghoa dan memperkuat nasionalisme Cina di kalangan Cina Hindia Belanda adalah ketika pada 1899 status orang-orang Jepang di Hindia Belanda dipersamakan dengan golongan Eropa. Ini terjadi karena modernisasi dan menjadi kuatnya Jepang.³⁹ Hal ini membuat orang-orang Cina percaya jika negara Cina kuat dan modern maka kedudukan mereka akan terangkat.

Memuncaknya ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial dan menguatnya nasionalisme Cina dalam masyarakat Cina di Hindia Belanda melahirkan organisasi-organisasi pergerakan yang memperjuangkan nasib orang-

³⁵ Dalam Undang-Undang Pertanian 1870 terdapat larangan untuk memindahkan hak milik sawah dari petani bumiputra kepada orang asing, lihat Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983), hlm. 88.

³⁶ Mely G. Tan, "Chinese Business in Indonesia," *Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 117.

³⁷ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta, 1994), hlm. 128.

³⁸ Onghokham, "Chung Hwa Hui, PTI dan Indonesia Merdeka," *loc. cit.*, hlm. 129.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 130.

orang Cina di Hindia Belanda. Organisasi pergerakan Tionghoa yang pertama kali lahir adalah Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK – Perhimpunan Tionghoa). THHK berdiri pada tahun 1900.⁴⁰ Salah satu program organisasi ini adalah mendirikan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Cina (Tiong Hoa Hak Tong) di seluruh Jawa.⁴¹ Pembentukan THHK disusul dengan munculnya surat-surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, misalnya *Li Po* (1901 di Sukabumi), *Kabar Perniagaan* (1903 di Batavia), *Pewartar Soerabaia* (1902 di Surabaya), dan *Djawa Tengah* (1909 di Semarang). Setelah pemunculannya maka organisasi dan surat-surat kabar tersebut mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan gerakan Cina Raya, yaitu mempersatukan orang Tionghoa Hindia Belanda dan mengarahkan orientasinya secara kultural dan politik ke negeri Cina.⁴²

Gerakan Cina Raya ini berkembang dengan pesat, pada tahun 1907 *Siang Hwee* (Kamar Dagang Tionghoa) telah terbentuk di berbagai kota di Jawa. Juga pada 1907, *T'ung-meng Hui* (“himpunan yang disumpah bersama” – partai revolusioner dr. Sun Yat Sen) membentuk cabang di Pintu Kecil. Cabang ini segera mengubah namanya menjadi *Chi-nan she* (Klub Pengembara Nanyang) dan mulai membangun taman-taman bacaan atau *Soe Po Sia* (Shu-pao she) di Hindia Belanda, yang bertujuan untuk menyebarkan doktrin-doktrin revolusioner.⁴³ Sebelum pembentukan Republik Cina, terdapat 52 taman bacaan di Hindia Belanda, diantaranya hanya 6 di Jawa. Taman-taman bacaan itu tidak hanya menyediakan bacaan, yang sebagian besar dalam bahasa Cina, tetapi juga menyelenggarakan ceramah dan diskusi, yang menggunakan bahasa Cina (mungkin dialek Hakka atau Kanton) sebagai perantara. Maka dari itu tidak banyak kaum peranakan yang ikut serta.⁴⁴

⁴⁰ Gamal Komandoko, *Boedi Oetomo* (Jakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 23.

⁴¹ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴² Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 23.

⁴³ R. N. Bayu Aji, *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 22.

⁴⁴ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 23.

2.3 *Sin Po*: Corong Utama Pendukung Nasionalisme Cina

Sin Po pada awalnya adalah surat kabar mingguan Tionghoa peranakan yang diterbitkan pada tahun 1910 di Batavia. Nama surat kabar ini kemudian diidentikan dengan golongan yang mendukung nasionalisme Cina.⁴⁵ Tidak lama sesudah lahirnya Republik Cina pada 1912, *Sin Po* berkembang menjadi surat kabar harian yang besar. *Sin Po* menjadi lawan utama *Kabar Perniagaan*, yang dikuasai oleh opsir-opisir Tionghoa Peranakan (juga dikenal sebagai Kapitan Cina) dan berpendirian konservatif. *Sin Po* di bawah pimpinan Kwee Hing Tjiat (1916-1918) mulai bergerak memimpin masyarakat Tionghoa dalam hal-hal politik.⁴⁶ Pengaruh *Sin Po* sebagai suatu kekuatan politik menjadi meluas sesudah Konferensi Semarang 1917.

Menjelang pembentukan *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang bersamaan dengan berlangsungnya Perang Dunia I muncul masalah *Indie Weerbar* (pertahanan Hindia Belanda). Oleh karena merasa terancam oleh Jepang, beberapa orang yang tertarik pada masalah ini membentuk *Comite Indie Weerbar*⁴⁷ (Panitia Pertahanan Hindia Belanda) pada Juli 1916 dan mengajukan suatu usul untuk menerapkan wajib militer (milisi) bagi kawula Belanda.⁴⁸ Hampir bersamaan dengan itu, pada pertengahan 1917, dikeluarkan suatu peraturan mengenai keanggotaan *Volksraad*, yang menetapkan bahwa orang Belanda dan mereka yang berstatus Eropa (yaitu beberapa orang bumiputra dan beberapa orang Tionghoa) mempunyai hak pilih. Ini berarti bahwa para anggota dewan daerah dari golongan Tionghoa yang berstatus Eropa mempunyai hak untuk memilih calon anggota *Volksraad*. Mula-mula tidak jelas berapa banyak orang Tionghoa akan diwakili dalam *Volksraad*.⁴⁹ Kedua isu penting ini mendorong diselenggarakannya

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

⁴⁶ Leo Suryadinata, "Tjoe Bou San: Nasionalis Tionghoa yang Mati Muda," *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*, ed. Ainin Dita Z (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 3.

⁴⁷ Komite ini terdiri dari orang Eropa dan Indonesia. Orang-orang Indonesia dalam komite tersebut merupakan wakil-wakil dari Sarekat Islam, Budi Utomo, Persatuan Bupati, dan Persatuan Pangeran, lihat Robert Van Niel, *Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2010), hlm. 191-192.

⁴⁸ Gamal Komandoko, *Op. Cit.*, hlm. 115.

⁴⁹ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 28.

konferensi yang mengundang berbagai organisasi Tionghoa untuk mendiskusikan masalah-masalah tersebut.

Konferensi organisasi-organisasi Tionghoa untuk membahas keikutsertaan golongan Tionghoa dalam *Volksraad* akhirnya diselenggarakan di Semarang pada tanggal 4 November 1917. Konferensi ini merupakan pertemuan terbesar yang pernah diselenggarakan oleh orang-orang Tionghoa sejak timbulnya gerakan Cina Raya.⁵⁰ *Sin Po* yang berada di bawah pimpinan Kwee Hing Tjiat dan didukung oleh organisasi peranakan lainnya menolak usul Kan Hok Hoei, seorang peranakan yang pro Belanda, untuk ikut serta dalam politik lokal dengan alasan bahwa orang Tionghoa adalah warga negara Cina (penolakan itu ada hubungannya dengan rencana pemerintah Belanda mengadakan *Indie Weerbar* dimana kawula Belanda diwajibkan menjadi milisi. Dan ini merupakan salah satu sebab peranakan Tionghoa tidak mau dianggap kawula Belanda).⁵¹

Mereka yang mendukung pandangan-pandangan *Sin Po* mulai dianggap sebagai suatu kelompok tertentu, yang dikenal sebagai kelompok *Sin Po*. Kelompok ini menganjurkan persatuan antara kaum peranakan dan totok, mendorong anak-anak kaum peranakan untuk mendapatkan pendidikan Cina dan mendukung keikutsertaan orang Tionghoa dalam dunia politik negeri Cina. Golongan *Sin Po* menolak untuk ambil bagian dalam masalah politik setempat, sebab mereka percaya bahwa hal itu dapat memecah belah golongan Tionghoa Hindia Belanda. Negeri Cina adalah pelindung bagi orang-orang Tionghoa perantauan, dan kaum Tionghoa peranakan dapat mempertahankan hidupnya kalau mereka terikat dengan Cina. Tidak jelas bagaimana Cina dapat melindungi mereka, tetapi mereka mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan untuk mencapai hal ini lewat saluran diplomasi. Oleh karena itu, *Sin Po* mengutuk opsir-opsir Tionghoa dan para pemimpin Tionghoa peranakan yang dalam pandangan mereka, bermaksud memimpin golongan Tionghoa Hindia Belanda ke arah yang salah.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

⁵¹ Leo Suryadinata, "Tjoe Bou San: Nasionalis Tionghoa yang Mati Muda," *loc. cit.*, hlm. 3-4.

⁵² Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 38-39.

Pada 1918 *Sin Po* yang ketika itu dipimpin Tjoe Bou San mulai menggerakkan orang Tionghoa di Hindia Belanda untuk memberantas Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*, selanjutnya disebut WNO) yang menyatakan bahwa semua orang Tionghoa Hindia Belanda adalah kawula Belanda.⁵³ Perlu disebutkan di sini bahwa sebelum Revolusi 1911, Kekaisaran Cina sudah mengumumkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kekaisaran (pada 1909) dimana ditegaskan bahwa semua orang yang berdarah Cina dianggap berkewarganegaraan Cina. Setahun sesudah itu, pemerintah Belanda juga mengumumkan bahwa penduduk yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda (*Nederlands Onderdanen*). Peranakan Tionghoa otomatis menjadi kawula Belanda.⁵⁴

Sikap dan pandangan politik kelompok *Sin Po* ini dapat dilihat dari tulisan Tjoe Bou San, pemimpin redaksi *Sin Po*, yang menulis sebuah artikel berjudul “Fromberg dan Pergerakan Tionghoa” dalam harian *Sin Po* untuk mengkampanyekan penentangan terhadap WNO. Artikel ini ditulis untuk mengkritik P.H. Fromberg Sr, seorang ahli hukum Belanda yang bersimpati pada golongan peranakan Tionghoa dan menganjurkan peranakan Tionghoa untuk menerima WNO. Dalam artikel tersebut Tjoe Bou San berargumen bahwa orang Tionghoa di Hindia Belanda adalah orang asing yang berbeda kepentingan dengan golongan lain di Hindia Belanda sehingga harus menolak WNO melalui pernyataannya sebagai berikut:

Tanda paling terutama yang orang ada jadi rakyat dari suatu negeri bukan yang orang mesthi menanggung kewajiban milisi, seperti rupanya hendak dibikin orang percaya oleh itu propagandis-propagandis, dengan membilang yang Hindia Belanda satu hari satu malam bisa terancam dengan bahaya lantaran serangan dari luar – tapi yang orang ada punya hak atas tanah di itu negeri, satu hak yang tiada didapat oleh orang asing.

Sebaliknya keadaan orang Tionghoa kurang lebih sudah jadi orang asing, sebab mereka tidak ada hak atas tanah, yang menjadi tanda rakyat dari Hindia Belanda. Yang mempunyai itu hak melainkan orang Bumiputera. Maka orang Bumiputera bolehlah merasa senang akan tanggung kewajiban milisi, kalau mereka memang merasa senang akan tanggung kewajiban milisi, kalau mereka memang merasa dengan

⁵³ *Ibid.*, hal. 43.

⁵⁴ Leo Suryadinata, “Tjoe Bou San: Nasionalis Tionghoa yang Mati Muda,” *loc. cit.*, hlm. 4.

terampasnya Hindia oleh lain bangsa mereka punya kemajuan yang telah didapat sekarang akan jadi mundur kembali. Juga orang Belanda boleh merasa senang tanggung kewajiban milisi buat belakan mereka punya hak dipertuan di ini Hindia. Tapi orang Tionghoa, apakah yang mereka mau belakan, hingga mereka mesti merasa senang angkat senjata buat lindungi Hindia dari serangan luar?⁵⁵

Tjoe Bou San berpendapat bahwa pemerintah Hindia Belanda mendiskriminasi, merendahkan orang-orang Tionghoa, dan tidak akan menjamin kepentingan orang-orang Tionghoa. Untuk menjamin kepentingan serta meningkatkan statusnya, orang-orang Tionghoa harus membantu negeri Cina agar menjadi kuat sehingga bisa melindungi orang-orang Tionghoa perantauan. Dalam pandangannya, pemerintah Hindia Belanda tidak berhak untuk menuntut kewajiban menjadi milisi kepada golongan Tionghoa sebab golongan Tionghoa tidak diperlakukan sebagai warga negara oleh pemerintah Hindia Belanda, melainkan diperlakukan sebagai orang asing dengan peraturan yang melarang golongan Tionghoa memiliki tanah di Hindia Belanda. Oleh karena itu golongan Tionghoa sebagai orang asing tidak berkepentingan untuk turut serta membela negara Hindia Belanda.

Kampanye menentang WNO sebenarnya terjadi delapan tahun setelah diumumkannya WNO. Kampanye itu terjadi ketika milisi akan dikenakan pada kaum peranakan. Kelompok *Sin Po* berhasil melancarkan kampanye ketika milisi diusulkan dalam *Volksraad*. Tujuan jangka pendek kampanye ini adalah untuk menghapuskan usul tentang milisi. Namun demikian, itu bukanlah satu-satunya tujuan. Oleh karena tidak puas dengan status golongan Tionghoa yang lebih rendah, kelompok *Sin Po* berusaha memperoleh status Eropa untuk golongan Tionghoa. Mereka tidak memperjuangkan persamaan semua ras yang ada di Hindia Belanda, tetapi hanya antara orang Tionghoa dan Belanda. Dalam pengertian ini, kampanye tersebut merupakan suatu ungkapan ultranasionalisme Cina sebab bagi golongan *Sin Po* orang-orang Tionghoa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang bumiputra.⁵⁶

⁵⁵ Tjoe Bou San, "Fromberg dan Pergerakan Tionghoa," *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 – 2002*, ed. Leo Suryadinata (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 45-46.

⁵⁶ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 49.

Usaha menentang WNO mengalami kegagalan, dalam arti bahwa orang Tionghoa Hindia Belanda tidak memperoleh baik hak repudiasi (penolakan) maupun status Eropa. Dibatalkannya usul milisi menyebabkan kampanye kehilangan daya geraknya. Banyak kaum Tionghoa peranakan dan kaum pengusaha kaya yang tidak menyokong kampanye karena mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sudah mantap di Hindia Belanda. Akhirnya, yang paling penting, reaksi Pemerintah Cina terhadap kampanye itu tidak membantu. Pemerintah Cina mengalami kesukaran dalam menuntut kaum peranakan di Hindia sebagai warga negaranya. Perjanjian Konsuler akhirnya diperbarui dan ini secara langsung memadamkan kampanye menentang WNO.⁵⁷

2.4 Chung Hwa Hui: Orientasi Baru ke Hindia Belanda

Pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi ketidakpuasan di kalangan Tionghoa peranakan dan meredam gerakan-gerakan yang menyebarkan nasionalisme Cina. Dengan undang-undang tahun 1907 orang-orang Tionghoa dapat memperoleh status Eropa dengan persyaratan khusus. Pada 1908 Hollandsch Chineesche School (HCS) atau sekolah dasar berbahasa Belanda khusus anak-anak Tionghoa dibuka untuk mengimbangi sekolah THHK. Praktik-praktik anti diskriminasi terhadap penduduk Tionghoa benar-benar dihapus pada 1918 yang ditandai dengan penghapusan *passenstelsel*.⁵⁸

Dalam pertengahan tahun 1920-an, banyak kaum terpelajar Tionghoa yang pulang ke Hindia Belanda setelah menempuh pendidikan di Negeri Belanda; banyak diantara mereka bermaksud untuk melibatkan diri dalam politik setempat guna memperbaiki posisinya. Berbeda dengan kelompok *Sin Po* yang mengharapkan perlindungan dari Negeri Cina dan ingin bekerja di luar lembaga-lembaga kolonial, para cendekiawan Tionghoa didikan Belanda ini tidak melihat Cina sebagai suatu sumber perlindungan. Lebih benar, mereka melakukan usaha sendiri untuk bekerja di dalam kerangka kolonial yang ada. Pada bulan Agustus 1926 mereka membentuk satu perhimpunan bernama Chung Hwa Club, yang

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 49-50.

⁵⁸ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 87.

mengambil prakarsa dalam membuat persiapan bagi kongres untuk membentuk satu organisasi Tionghoa baru.⁵⁹

Kongres Chung Hwa pertama diselenggarakan pada 19-20 April 1927. Kaum Tionghoa peranakan berpendidikan Belanda dan para pengusaha Tionghoa Peranakan paling aktif mensponsori kongres tersebut. Kongres yang diselenggarakan di Semarang itu, pusat dari sejumlah Tionghoa peranakan yang kaya, dihadiri oleh kira-kira 300 orang. Peserta kongres ini mencakup lebih banyak kaum Tionghoa peranakan terpelajar dan sangat sedikit kaum totok. Kongres ini menghasilkan keputusan untuk mendirikan organisasi politik, dan panitia persiapan kongres diberi tanggung jawab untuk menyusun anggaran dasar organisasi itu. Setahun kemudian, bulan April 1928, diadakan Kongres Chung Hwa kedua di Semarang. Dalam kongres ini Chung Hwa Hui (Perhimpunan Tionghoa, selanjutnya disebut CHH) secara resmi lahir pada tanggal 8 April 1928. HH Kan terpilih menjadi ketuanya.⁶⁰

Tujuan CHH menurut Anggaran Dasarnya adalah “bekerja untuk perbaikan orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam arti luas dengan menggunakan sarana yang benar dan menurut hukum”.⁶¹ CHH menerima kedudukan kawula Belanda dan menganggap hubungan orang-orang Tionghoa di sini dengan negeri Cina hanya sebatas hubungan dalam lapangan kebudayaan, dan lain-lain yang tak bersangkutan paut dengan soal-soal ketatanegaraan.⁶² CHH mendapatkan dukungan terutama dari orang-orang Tionghoa peranakan kaya seperti opsir, tuan tanah, pengusaha besar, dan kaum cendekiawan. Kelompok ini bersikap loyal kepada rezim kolonial Belanda karena mereka merasa lebih aman di bawah kekuasaan Belanda. Salah satu bukti keberpihakan CHH adalah penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam rapat-rapatnya.⁶³ Mereka agak jauh dari kaum Tionghoa peranakan jelata. Tionghoa peranakan jelata sering menyebut CHH sebagai ‘golongan *packard*’ karena sikap elitis CHH.⁶⁴ Bertentangan dengan

⁵⁹ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 56-57.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 62-70.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 70.

⁶² Onghokham, “Chung Hwa Hui, PTI dan Indonesia Merdeka,” *loc. cit.*, hlm. 136.

⁶³ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁶⁴ Onghokham, “Chung Hwa Hui, PTI dan Indonesia Merdeka,” *loc. cit.*, hlm. 136.

golongan *Sin Po*, CHH menganjurkan agar WNO diterima, demikian juga agar orang Tionghoa berpartisipasi dalam dewan-dewan lokal dan *Volksraad*.⁶⁵ Kehadiran CHH merupakan bentuk tumbuhnya orientasi politik baru yang berkiblat pada Hindia Belanda.

Para pemimpin CHH yang paling terkemuka adalah HH Kan dan Phoa Liong Gie. Persepsi mereka mengenai kedudukan orang Tionghoa di Hindia Belanda patut mendapat perhatian. Kan beranggapan bahwa kepentingan kaum Tionghoa akan terjamin baik di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan karena itu dalam orientasi politiknya ia menjadi sangat pro-Belanda. Pada tahun 1918 ia memasukkan laporan yang mendukung *status quo*.⁶⁶ Sampai tahun 1941 Kan masih selalu mendukung pemerintahan Belanda. Pada bulan November 1941, Kan menyatakan dengan jelas bahwa ia menentang setiap pembaruan politik di Hindia Belanda.⁶⁷

Pemimpin lainnya, Phoa Liong Gie, seorang pengacara muda yang menjadi anggota Badan Pimpinan Pusat CHH, berpendapat agak berbeda. Seperti halnya HH Kan, Phoa juga mendukung WNO. Walaupun demikian ia berpendapat tidak ada seorang pun yang berhak mendesak kelompok minoritas Tionghoa ini ke salah satu pihak dalam pertentangan antara orang Belanda dan Indonesia. Selanjutnya Phoa mengatakan bahwa orang Tionghoa harus bersikap netral dalam pertentangan tersebut (tidak pro-Belanda tetapi juga tidak mendukung Indonesia) serta tetap melayani kelompok yang sedang berkuasa, baik itu Belanda maupun Indonesia.⁶⁸ Pemikiran Phoa Liong Gie ini membuat CHH dianggap sebagai oportunist oleh kaum nasionalis Indonesia.⁶⁹

⁶⁵ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 50.

⁶⁶ Robert van Niel, *Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2010), hlm. 271.

⁶⁷ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 51-52.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

⁶⁹ R. N. Bayu Aji, *Op. Cit.*, hlm. 26.

2.5 Berkembangnya Nasionalisme Indonesia dan Lahirnya Partai Tionghoa Indonesia

Sesudah terjadinya pemberontakan PKI pada November 1926, rezim Belanda bersikap semakin reaksioner terhadap pergerakan nasional Indonesia. Pada periode antara 1927 hingga 1942, Hindia Belanda telah berubah menjadi *Politie Staat*.⁷⁰ Pengawasan sedemikian rupa, dan larangan-larangan terhadap pers maupun gerakan-gerakan lainnya demikian keras, sehingga banyak orang beranggapan bahwa sejak itu pemerintah Hindia Belanda sudah menjadi sistem diktatur yang terselubung.⁷¹ Semua harapan bagi terjalinnya kerjasama dengan Belanda benar-benar sudah hancur, satu-satunya taktik yang dimungkinkan untuk masa mendatang hanyalah perlawanan terhadap Belanda.⁷² Antagonisme rasial yang semakin meningkat antara Belanda dan Bumiputra ini membuat nasionalisme Indonesia semakin berkembang. Kehancuran PKI dan semakin tidak aktifnya Sarekat Islam memberikan jalan lapang bagi pergerakan nasional yang berhaluan nasionalisme sekuler. Perserikatan Nasional Indonesia yang berdiri pada 4 Juli 1927 segera menjadi perhatian utama dan mengambil alih tempat utama dalam pergerakan nasional.

Pada tahun 1930-an telah nampak adanya suatu masyarakat baru, yang dapat dinamakan masyarakat Indonesia. Masyarakat baru ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang sudah sanggup membedakan antara identitas suku dan kepentingan nasional. Ciri-ciri masyarakat baru ini nampak dalam alam pikiran mereka yang tidak lagi terbatas pada alam pikiran tradisional. Cita-cita mereka mengarah pada suatu satuan politik baru yang terlepas dari ikatan-ikatan tradisional maupun kolonial Belanda. Indonesia Merdeka adalah semboyan paling ekstrim dari cita-cita itu.⁷³

⁷⁰ Pengawasan ketat terhadap para aktivis dan organisasi pergerakan nasional oleh *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) menyebabkan munculnya anggapan ini. Lihat Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 54.

⁷¹ R.Z. Leirissa, *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 69.

⁷² M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 274.

⁷³ R. Z. Leirissa, *Op. Cit.*, hlm. 68.

Perkembangan nasionalisme Indonesia ini mendapat perhatian dari sebagian kalangan Tionghoa peranakan. Selain situasi politik tersebut, keadaan ekonomi pada masa tersebut juga memunculkan persepsi baru dalam masyarakat Tionghoa peranakan. Pasar saham dunia hancur dan 40 persen nilai saham hilang pada Oktober 1929, dunia mengalami kekacauan ekonomi yang kemudian dikenal dengan sebutan *Great Depretion*.⁷⁴ Depresi ekonomi dunia yang berdampak besar pada Hindia Belanda antara tahun 1929 – 1935 ini turut melahirkan kesadaran bagi Tionghoa peranakan bahwa nasib mereka berhubungan dengan nasib rakyat bumiputra. Tidak demikian dengan golongan totok yang masih dapat meninggalkan Hindia Belanda untuk kembali ke Negeri Cina. Di Cina mereka mempunyai keluarga yang menampung. Peranakan Tionghoa tidak lagi mempunyai saudara di Negeri Cina. Peranakan Tionghoa, terutama yang bekerja sebagai buruh dan usaha-usaha kecil, harus menerima nasib yang sama seperti rakyat Indonesia pada umumnya. Ini menyadarkan mereka bahwa tanah air mereka adalah Indonesia, dan mereka menjadi salah satu bagiannya.⁷⁵

Kelahiran Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sebagai sebuah partai Tionghoa peranakan yang berhaluan nasionalis Indonesia memang tepat pada saatnya. Munculnya PTI dalam kancah pergerakan nasional Indonesia diawali oleh sebuah peristiwa boikot pemberitaan sepakbola oleh para wartawan ‘kulit berwarna’ di Surabaya pada Mei 1932. Kala itu Bekker, seorang wartawan Belanda yang juga pejabat dalam kepengurusan NIVB (federasi sepakbola Hindia Belanda pada saat itu), melarang wartawan bangsa kulit berwarna (bumiputra dan *Vreemde Oosterlingen*) datang meliput pertandingan. Alasan pelarangan peliputan tersebut adalah karena wartawan kulit berwarna sering menjelek-jelekkkan NIVB. Liem Koen Hian yang saat itu menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Sin Tit Po* marah kemudian menyerukan agar dilakukan pemboikotan pemberitaan dan tidak menonton pertandingan sepakbola yang diselenggarakan NIVB. Semua surat kabar milik orang kulit berwarna dan masyarakat Surabaya mengikuti boikot seruan

⁷⁴ Howard Cincotta, ed., *Garis Besar Sejarah Amerika* (Jakarta: USIS, 2008), hlm. 285.

⁷⁵ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 94-95.

Liem.⁷⁶ Liem kemudian ditangkap oleh PID namun tak lama kemudian dibebaskan karena protes dari pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia di *Volksraad*.

Beberapa bulan kemudian Liem Koen Hian, Ong Liang Kok, dan kaum peranakan lainnya di Surabaya mendirikan PTI pada 25 September 1932. Persatoean Bangsa Indonesia (PBI) dan kaum nasionalis Indonesia moderat lainnya, terutama dr. Soetomo dan Soeroso, ikut menyokong berdirinya PTI. Tujuan PTI adalah “membantu kemajuan ekonomi, sosial dan politik dari Indonesia sampai jadisatu negeri (*staat*) dengan satu rupa hak dan kewajiban buat sekalian orang rakyatnya”.⁷⁷

2.6 Zaman Pendudukan Jepang: Akhir dari Pergerakan Tionghoa

Tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat pada Jepang di Kalijati, Gubernur Jenderal van Starckenborgh ditawan oleh pihak Jepang. Salah satu prioritas kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia adalah memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam rangka mobilisasi rakyat untuk kepentingan perang ini maka pada Maret 1942 secara resmi semua kegiatan politik dilarang dan kemudian semua perkumpulan yang ada dibubarkan (termasuk organisasi-organisasi Tionghoa), sebagai gantinya Jepang mendirikan organisasi-organisasi baru.⁷⁸ Jepang juga membentuk satu organisasi Tionghoa yang dikenal dengan nama *Hwa Chiao Chung Hui* (HCCH), dalam bahasa Jepang disebut *Kakyo Sokai*. Organisasi ini didirikan untuk kepentingan perang Jepang (pengumpulan dana, pengerahan tenaga, menyediakan wanita penghibur, dan sebagainya).⁷⁹

Selama masa kekuasaannya Jepang menghadapi banyak masalah yang sama dengan yang dihadapi Belanda dan menggunakan banyak cara pemecahan yang sama. Hukum kolonial Belanda tetap berlaku terkecuali yang bertentangan

⁷⁶R. N. Bayu Aji, *Op. Cit.*, hlm. 113-115.

⁷⁷Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 87.

⁷⁸M. C. Ricklefs, *Op. Cit.*, hlm. 302.

⁷⁹Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 102.

dengan hukum militer Jepang.⁸⁰ Politik yang dijalankan Jepang terhadap orang Tionghoa pun tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya, Jepang menjalankan politik “Tionghoa tetap Tionghoa”. Pada 11 April 1942 Jepang mengeluarkan Undang-Undang No. 7 yang menggolongkan orang-orang Tionghoa sebagai bangsa asing dan oleh karena itu mereka harus membayar pajak bangsa asing.⁸¹ Oleh sebab penggolongan dalam UU tersebut, Jepang memberlakukan kembali peraturan sistem perkampungan dan sistem surat pas jalan yang telah dihapus pada 1918, setiap Tionghoa dewasa yang hendak bepergian diwajibkan membawa kartu pengenal sebagai orang asing dan surat jalan.⁸² Sekitar 500 tokoh Tionghoa yang anti-Jepang dipenjarakan.⁸³ Walaupun demikian ada juga orang Tionghoa dan beberapa nasionalis Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang.⁸⁴

Menjelang akhir Perang Dunia II kedudukan Jepang makin terdesak. Keadaan yang semakin tidak menguntungkan bagi Jepang ini membuat pemerintahan pendudukan Jepang di Hindia mulai melonggarkan politiknya. Pada 9 September 1944 Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari kepada Indonesia.⁸⁵ Langkah ini diambil untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Tekanan terhadap golongan Tionghoa pun juga dikurangi dengan penghapusan kewajiban surat pas jalan pada Desember 1944.⁸⁶

Selanjutnya bulan Maret 1945 di Indonesia didirikanlah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Liem Koen Hian diikutsertakan sebagai salah seorang anggota dalam BPUPKI bersama dengan 3 wakil Tionghoa lainnya yaitu Oei Tjong Hauw (dari CHH), Oei Tiang Tjoei (pemimpin redaksi surat kabar *Hong Po* yang pro-Jepang dan ketua *Hwa Chiao Chung Hui* di Jakarta), dan Tan

⁸⁰ M. C. Ricklefs, *Op. Cit.*, hlm. 300.

⁸¹ Priyanto Wibowo, “Tionghoa Bagian dari Masyarakat Multikultural Indonesia: Sebuah Perspektif Historis.” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Masyarakat Tionghoa Bagian dari Masa Depan Indonesia”, Restaurant Nelayan, Jakarta, 15 Mei 2011.

⁸² Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 102-104.

⁸³ Melly G. Tan, “Ethnic Chinese in Indonesia,” *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 6.

⁸⁴ Leo Suryadinata. *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 55.

⁸⁵ Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 36.

⁸⁶ Andjarwati Noordjanah, *Op. Cit.*, hlm. 107.

Eng Hoa (Seorang Ahli Hukum). Diantara wakil-wakil golongan Tionghoa tersebut terdapat perbedaan pemikiran mengenai kewarganegaraan orang Tionghoa di Republik Indonesia yang akan berdiri. Liem Koen Hian tetap mempertahankan pandangannya pada masa sebelum pendudukan Jepang. Ia menganjurkan semua Tionghoa di Indonesia dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan Oei Tiang Tjoei dan Oei Tjong Hauw lebih mendukung kewarganegaraan Cina.⁸⁷ Dalam sidang BPUPKI yang membahas kewarganegaraan Indonesia, diputuskan bahwa hanya etnis-etnis bumiputra Indonesia saja yang akan langsung menjadi warga negara Indonesia sedangkan yang lainnya akan dikukuhkan sebagai warga negara dengan hukum. Liem memprotes keputusan itu dengan mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota panitia pada 16 Juli 1945.⁸⁸

2.7 Kewarganegaraan Orang Tionghoa di Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Dengan demikian berakhirilah Perang Dunia II. Oleh karena pihak Sekutu tidak menaklukkan kembali Indonesia, maka kini terjadi suatu kekosongan politik: pihak Jepang masih tetap berkuasa namun telah menyerah, dan tidak tampak kehadiran pasukan Sekutu yang akan menggantikan mereka.⁸⁹ Kekosongan kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Sementara itu Belanda yang datang kembali ke Indonesia pada akhir September 1945 bersama pasukan Sekutu bermaksud hendak memulihkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pada tahun 1946 Belanda berhasil menduduki banyak kota besar Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia pada masa ini berkepentingan menarik dukungan orang-orang Tionghoa untuk membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Untuk menarik simpati orang-orang

⁸⁷ Leo Suryadinata. *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 55.

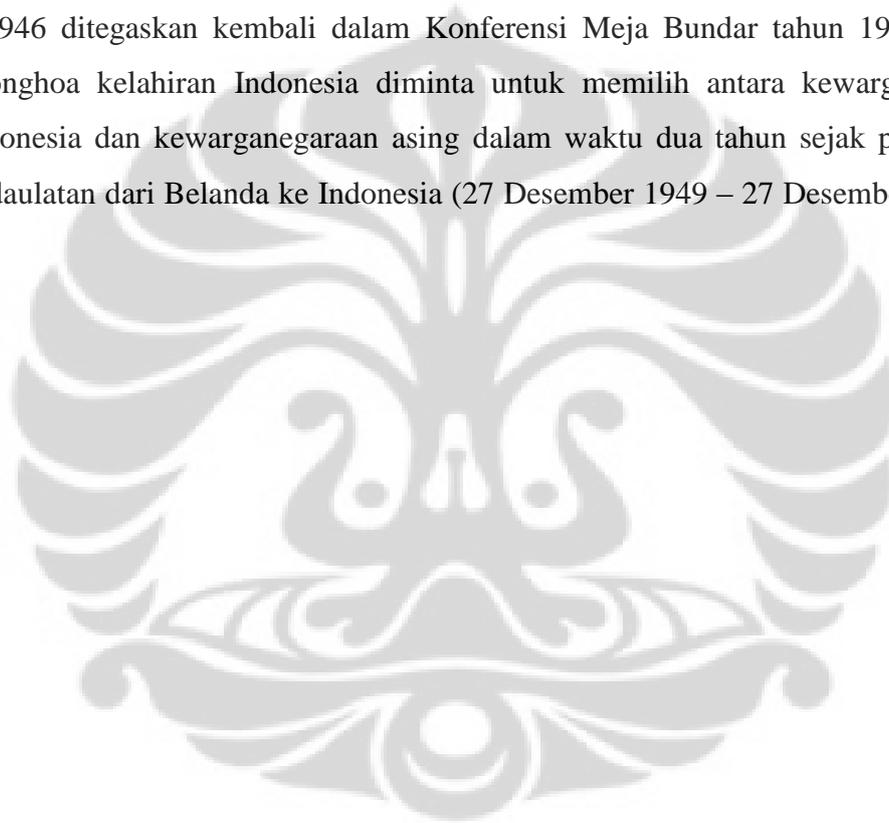
⁸⁸ Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, *Detik-Detik Proklamasi: Saat-saat Menegangkan Menjelang Kemerdekaan Republik* (Yogyakarta: Narasi, 2011), hlm. 62.

⁸⁹ Adam Malik, *Riwayat Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Widjaya, 1982), hlm. 24.

Tionghoa dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 pada April 1946.⁹⁰ Dalam UU ini disebutkan bahwa:

“Warga Negara Indonesia terdiri dari orang asli yang bertempat tinggal di daerah di Indonesia dan orang-orang yang tidak dalam kelompok yang tersebut di atas, akan tetapi yang lahir di daerah-daerah territorial Indonesia dan telah tinggal di sana selama lima tahun terakhir berturut-turut, serta mereka yang telah berumur 21 tahun, dengan syarat orang-orang tersebut tidak menolak kewarganegaraan Indonesia karena menjadi warga negara lain.”⁹¹

Undang-Undang ini menganut asas *ius soli* dan “sistem pasif”. UU No. 3/1946 ditegaskan kembali dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Orang Tionghoa kelahiran Indonesia diminta untuk memilih antara kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan asing dalam waktu dua tahun sejak penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia (27 Desember 1949 – 27 Desember 1951).⁹²



⁹⁰ Chris Verdiansyah, *ed.*, *Jalan Panjang Menjadi WNI* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 86.

⁹¹ Leo Suryadinata. *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 116.

⁹² *Ibid.*, hlm. 117.

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK AWAL LIEM KOEN HIAN (1919 – 1926)

Liem Koen Hian dilahirkan di Banjarmasin pada 1896. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang kemudian menjadi pegawai Hindia Belanda. Liem menerima pendidikan sekolah dasar Belanda di kota kelahirannya.⁹³ Setelah meninggalkan bangku sekolah, ia bekerja sebentar sebagai juru tulis pada perusahaan minyak Shell di Balikpapan. Namun rupanya ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Ia kemudian kembali ke kota kelahirannya untuk bekerja di sebuah surat kabar peranakan yang bernama *Penimbangan*.⁹⁴

Pada waktu Perang Dunia I Liem bermigrasi ke Surabaya dan bekerja sebagai anggota dewan redaksi majalah *Tjhoen Tjhioe* (dari tahun 1915 sampai 1916).⁹⁵ Pada awal 1917 Liem mendirikan surat kabar mingguan *Soo Lim Poo*, sekaligus menjadi pemimpin redaksinya, namun surat kabar ini tidak berumur panjang. Pada akhir tahun 1918 ia diminta untuk memimpin surat kabar *Sinar Soematra* di Padang hingga tahun 1921. Kiprahnya berlanjut ketika tahun 1921 hingga 1925 Liem menjadi pemimpin redaksi *Pewartar Soerabaia*, sebuah harian milik The Kian Sing, seorang peranakan penganut nasionalisme Cina yang sangat aktif dalam Konferensi Semarang 1917.⁹⁶

Nasionalisme Cina sedang mencapai puncaknya di Jawa pada awal abad ke-20. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda menimbulkan keresahan di kalangan Tionghoa peranakan. Sebagaimana halnya banyak kaum Tionghoa peranakan pada masa itu, nasionalisme Cina pun mempengaruhi Liem Koen Hian. Ketika grup *Sin Po* mempropagandakan penolakan terhadap *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO) atau undang-undang

⁹³ M. P. B. Manus, *et. al.*, *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 134.

⁹⁴ Leo Suryadinata, "Liem Koen Hian: Peranakan yang Mencari Identitas," *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*, ed. Ainin Dita Z (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 64.

⁹⁵ Ananda B. Kusuma, *et. al.*, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hlm. 591.

⁹⁶ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta, 1994), hlm. 132.

kekawulanegaraan Belanda dan *Indie Weerbar* (pertahanan Hindia) pada akhir dasawarsa kedua abad ke-20, Liem ikut mendukung kampanye tersebut melalui tulisan-tulisannya selama periode ia menjadi pemimpin redaksi *Sinar Soematra* dan *Pewarta Soerabaia* (1918-1925).

3.1 Menentang *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*

Di awal abad ke-20 nasionalisme Cina tumbuh subur di tengah memuncaknya ketidakpuasan masyarakat Tionghoa terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Negeri Cina mulai memperhatikan kaum Tionghoa peranakan di perantauan. Kapal-kapal perang Cina yang disertai seorang duta, inspektur-inspektur pengajaran, kesempatan belajar di Negeri Cina, dan lain-lain dikirimkan oleh Kaisar Cina ke Hindia Belanda. Pada 1909 Kekaisaran Cina mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kekaisaran yang menegaskan bahwa semua orang yang berdarah Cina dianggap berkewarganegaraan Cina. Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk menarik simpati orang-orang Tionghoa di perantauan agar mau membantu Negeri Cina yang sedang berusaha melepaskan diri dari pengaruh bangsa-bangsa asing.

Situasi ini membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda khawatir dan terpaksa melonggarkan tekanan-tekanannya pada masyarakat Tionghoa peranakan. Pada 1910, setahun setelah Negeri Cina mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kekaisaran, pemerintah kolonial Hindia Belanda merespons dengan memberlakukan *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO) atau Undang-Undang Kekawulanegaraan Belanda. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa penduduk yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda (*Nederlands Onderdanen*) sehingga peranakan Tionghoa otomatis menjadi Kawula Belanda.

Pemberlakuan WNO ini mendapat tantangan keras dari para nasionalis Cina di Hindia Belanda, termasuk Liem Koen Hian. Kampanye besar-besaran untuk menentang WNO dimulai dengan memanfaatkan momentum adanya wacana pembentukan *Indie Weerbar* (milisi Hindia). Dalam tulisannya yang

berjudul *Oendang-Oendang Karahajatan Olanda I*, Liem memprotes kedudukan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda yang diatur dalam WNO, sebagai berikut:

Dengen itoe oendang-oendang pamarentah menjataken sategas-tegasnja, bahoea tjaranja ia memperlakoeken orang Tionghoa dengan berlaenan dari tetamoe-tetamoe dari Barat, disebabkan oleh kerna ia anggep bangsa Tionghoa tida lebih dari satoe bangsa taloekan. Sekarang, sasoeatoe orang Tionghoa, peranakan dan totok, bisa kata kebangsaannja dihinaken.⁹⁷

Menurut Liem Koen Hian, WNO adalah penghinaan terhadap bangsa Tionghoa sebab dalam WNO kedudukan peranakan Tionghoa berada di bawah golongan Eropa. Tionghoa peranakan merupakan bangsa asing di Hindia Belanda, bukan bagian dari bangsa yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga tidak seharusnya WNO menempatkan golongan Tionghoa peranakan di bawah golongan Eropa seolah-olah bangsa Tionghoa adalah rakyat dari negeri yang ditaklukan Belanda.

Bagi Liem, kedudukan bangsa Tionghoa sebagai bangsa asing tidak lebih rendah daripada bangsa Jepang dan Eropa. Seharusnya pemerintah kolonial menempatkan orang-orang Tionghoa pada derajat yang sama dengan orang-orang Jepang dan Eropa di Hindia Belanda. Sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa Eropa dan Jepang, maka Liem menuntut persamaan hak dan kewajiban antara Tionghoa peranakan dengan orang-orang Jepang dan Eropa. WNO yang menempatkan kaum Tionghoa peranakan sebagai rakyat negara jajahan dianggap telah melanggar hak-hak bangsa Tionghoa sebagai bangsa asing yang seharusnya diperlakukan sebagai “tamu” dengan penuh rasa hormat.

Selain membedakan hak-hak orang Tionghoa dengan orang Eropa, WNO juga dianggap merugikan kaum Tionghoa peranakan karena hak-haknya dan hak-hak rakyat bumiputra pun dibedakan. Diskriminasi ini membuat peranakan Tionghoa semakin tertekan. Mengenai hal ini Liem menyatakan sebagai berikut:

Peranakan Tionghoa jang soeda djadi rahajat Olanda, tida mempoenjai hak dan kewadajiban sama seperti orang Olanda dan djoega tida

⁹⁷ Liem Koen Hian. “Oendang-Oendang Karahajatan Olanda I” dalam *Sinar Sumatra*, 3 Februari 1919.

mempunyai hak dan kewajiban sama seperti orang boemipoetra. Bahoea peranakan Tionghoa masi diperbedaken dari orang Olanda, itoelah soeda dikatahoei. Tapi, boleh djadi ada banjak orang Tionghoa jang belon pikir, bahoea marika poen dibedaken dari orang boemipoetra. Satoe tjonto kita maoe kasi. Orang boemipoetra boleh berladang, tapi orang Tionghoa sampe ini djam tida boleh. Djadi, dalem perkara hak orang Tionghoa peranakan sekarang mengambang diantara orang Olanda dan orang boemipoetra.⁹⁸

WNO dinilai tidak konsisten dalam mengatur kedudukan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Tionghoa peranakan tidak diberikan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya diberikan kepada bangsa-bangsa asing di Hindia Belanda namun juga tidak diberi hak dan kewajiban penuh sebagai rakyat Hindia Belanda. Kedudukan yang mengambang dalam WNO ini membuat kaum Tionghoa peranakan terjepit, hak-haknya sangat terbatas, dan kepentingannya tidak benar-benar terjamin. Di satu sisi pemerintah Cina tidak dapat melindungi Tionghoa peranakan Hindia Belanda sebab kaum Tionghoa peranakan adalah kawula negara Belanda tetapi di sisi lain pemerintah Hindia Belanda juga tidak sepenuhnya menjamin kepentingan Tionghoa peranakan.

Liem berpendapat bahwa tidak ada niat baik dari pemerintah kolonial Hindia Belanda di balik pemberlakuan WNO, yang mencegah Negeri Cina ikut campur dalam urusan peranakan Tionghoa di Hindia Belanda. Ia berargumen bahwa pembedaan hak dan kewajiban berdasarkan ras dalam aturan WNO merupakan politik adu domba yang dijalankan Belanda sekaligus bukti bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki nasib peranakan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa dan bumiputra dengan sengaja dipisahkan agar tidak terdapat kepentingan bersama dan orang Tionghoa dibiarkan menjadi orang asing sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kelas perantara dalam struktur kolonial. WNO sebenarnya dibuat untuk mencegah negeri Cina melindungi kaum peranakan Tionghoa di Hindia Belanda sebab pemerintah Hindia Belanda takut jika suatu saat Cina menjadi negara kuat dan mampu menekan pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan status hukum yang sama dengan orang Eropa kepada kaum Tionghoa peranakan (seperti halnya orang Jepang)

⁹⁸ Liem Koen Hian. "Oendang-Oendang Karahajatan Olanda II" dalam *Sinar Sumatra*, 4 Februari 1919.

maka orang-orang bumiputra pun akan menuntut kedudukan yang sama pula. Agar hal tersebut tidak terjadi, pemerintah Hindia Belanda membuat WNO sehingga sekalipun Cina menjadi negara kuat dan memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kedudukan hukum setara dengan bangsa Eropa kepada bangsa Tionghoa, maka hanya Tionghoa totok saja yang akan mendapatkannya, sedangkan Tionghoa peranakan tidak. Dengan demikian tidak ada tuntutan rakyat bumiputra untuk pemberian status hukum serupa.⁹⁹

Atas dasar alasan-alasan itulah Liem menentang WNO. Dengan memanfaatkan isu *Indie Weerbar*, Liem mengajak kaum Tionghoa peranakan untuk segera bergerak bersama-sama memprotes WNO. Akan tetapi meski Liem menentang keras WNO, ia memahami bahwa ada sebagian kaum Tionghoa peranakan yang mendukung WNO dan ingin menjadi kawula negara Belanda. Bagi Liem, adalah hak setiap peranakan Tionghoa untuk memilih menjadi kawula negara Belanda atau menjadi warga negara Cina dan tetap menjadi orang asing di Hindia Belanda. Bagi peranakan Tionghoa yang memilih kekawulanegaraan Belanda, pilihan tersebut pun harus dihormati. Liem menuntut minimal WNO tidak dipaksakan kepada setiap peranakan Tionghoa serta memberi kesempatan kepada peranakan Tionghoa untuk memilih kewarganegaraan Cina.¹⁰⁰

3.2 Nasionalisme Cina

Penolakan terhadap WNO menurut Liem bukan sekedar karena WNO menempatkan kaum peranakan Tionghoa di bawah bangsa Eropa dan tidak memberikan keuntungan bagi kaum Tionghoa peranakan. Liem juga menolak anggapan bahwa orang-orang Tionghoa tidak setuju dengan WNO karena takut wajib militer. Lebih dari itu, kaum Tionghoa peranakan merasa dirinya bukanlah rakyat Hindia Belanda melainkan bagian dari bangsa Cina yang besar. Perasaan kebangsaan sebagai bangsa Cina membuat orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda tidak mau menjadi rakyat Hindia Belanda sekalipun diberi kedudukan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Liem Koen Hian. "Oendang-Oendang Karahajatan Olanda III" dalam *Sinar Sumatra*, 5 Februari 1919.

sama dengan orang Eropa. Bagi Liem kesetiaan terhadap negeri Cina adalah tanpa syarat. Sebagai seorang Tionghoa peranakan yang merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Tionghoa yang besar, Liem merasa berkewajiban untuk mengabdikan pada negeri Cina. Liem yakin bahwa kaum peranakan Tionghoa harus membantu negeri Cina agar Cina menjadi kuat. Ia percaya jika Cina menjadi kuat maka akan mampu melindungi kepentingan peranakan Tionghoa di Hindia Belanda dan negara-negara lainnya sehingga nasib Tionghoa peranakan tidak lagi terombang-ambing karena menjadi minoritas yang lemah di negeri asing. Hal itu diungkapkannya dalam tulisan berikut ini:

...saja ada seorang Tionghoa. Saja poenja tanah aer terletak di sana dan sedeng berichtiar boeat mengangkat dirinja. Dan dalem ichtiarnja itoe ia toedjoeken matanja boeat minta perteloengan dan bantoean pada poetra-poetranja jang setia, baik jang masih berdiam dalem negrinja, baikpoen jang berdiam di loear negri. Dan di antara poetra-poetranja jang berdiam di loear negri, adalah teritoeng djoega saja poenja bangsa di Hindia sini, jang, sebaliknja, poen toedjoeken matanja pada itoe negri leloehoer, dari siapa marika (peranakan Tionghoa) harep terangkatnja marika poenja deradjat.¹⁰¹

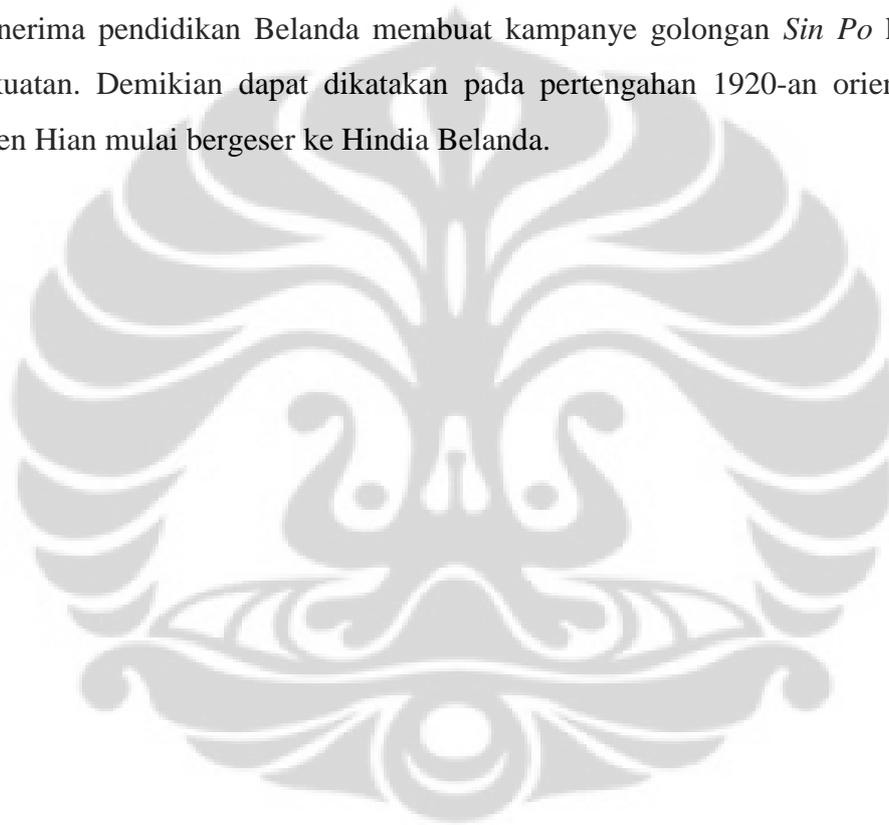
Orientasi ke negeri Cina ini masih dipertahankan Liem ketika ia menjadi pemimpin redaksi *Pewart Soerabaia* hingga tahun 1925. Memasuki dasawarsa 1920-an nasionalisme Cina semakin melemah. Bahkan beberapa bekas pemimpin kampanye yang menentang WNO seperti The Kian Sing dan Hauw Tek Kong mengubah haluannya dan berbalik mendukung WNO.

Ketika Hauw Tek Kong, bekas pendukung kuat golongan *Sin Po*, menyerukan kepada peranakan Tionghoa untuk menerima kekawulanegaraan Belanda serta setia kepada Belanda, Liem mengejek Hauw dengan mengatakan bahwa Hauw sedang bermimpi di tengah hari bolong. Liem berpendapat bahwa peranakan Tionghoa bisa menjadi 'rakjat Olanda jang setia dan sejati' kalau 800.000 Tionghoa di Hindia dimasak bersama-sama dengan beberapa ribu orang

¹⁰¹ Liem Koen Hian. "Oendang-Oendang Karahajatan Olanda I" dalam *Sinar Sumatra*, 3 Februari 1919.

Belanda di dalam sebuah kawah yang maha besar dan dari sana menciptakan semacam manusia baru.¹⁰²

Pemikiran Liem Koen Hian pada periode ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran golongan *Sin Po*. Memasuki pertengahan tahun 1920-an, pengaruh golongan *Sin Po* semakin melemah karena semakin berkurangnya pembatasan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap masyarakat Tionghoa peranakan. Dicabutnya kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*, tidak dilaksanakannya *Indie Weerbar*, ditambah lagi dengan meningkatnya peranakan Tionghoa yang menerima pendidikan Belanda membuat kampanye golongan *Sin Po* kehilangan kekuatan. Demikian dapat dikatakan pada pertengahan 1920-an orientasi Liem Koen Hian mulai bergeser ke Hindia Belanda.



¹⁰² Hauw Tek Kong. “Jingoisme” dalam *Keng Po*, 29 Januari 1925.

BAB IV

INDONESIERSCHAP: KEDUDUKAN ORANG TIONGHOA DI NEGARA INDONESIA DALAM PEMIKIRAN LIEM KOEN HIAN (1927 – 1951)

4.1 Situasi Hindia Belanda Pasca 1926

Pada 12 November 1926 terjadi pemberontakan komunis di sekitar Batavia dan Banten. Dua bulan kemudian (Januari 1927) pemberontakan serupa terjadi di pantai barat Sumatera. Kedua pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh pemerintah.¹⁰³ Pemberontakan komunis menimbulkan reaksi yang sangat keras dan tegas dari pemerintah Hindia Belanda. Enam hari setelah terjadinya revolusi di Batavia dan Banten, Dewan Hindia Belanda memenjarakan para pemimpin komunis terkemuka.¹⁰⁴ Untuk itu pada Januari 1927 Belanda membangun kamp pengasingan Boven Digoel di pedalaman Irian Barat untuk mengamankan para pemberontak tersebut.¹⁰⁵ Akibat revolusi, kira-kira 13.000 orang ditahan – dari jumlah itu setengahnya dibebaskan segera, sejumlah 4.500 lainnya dipenjarakan, dan sekitar 1.300 orang dikirim ke Boven Digoel. Hukuman ini disetujui oleh Gubernur Jenderal A.C.D de Graeff yang tiba beberapa bulan sebelum terjadinya pemberontakan.¹⁰⁶ Ini menandai suatu babak baru di atas pentas politik pergerakan nasional Indonesia.

Politik kolonial yang sangat keras itu sudah terasa sejak 1927. Pengawasan terhadap pergerakan nasional dilakukan sedemikian rupa, demikian juga larangan-larangan terhadap pers maupun gerakan-gerakan lainnya.¹⁰⁷ Antagonisme rasial yang semakin meningkat antara Belanda dan Bumiputra ini membuat nasionalisme Indonesia semakin berkembang. Kehancuran PKI dan semakin tidak aktifnya Sarekat Islam memberikan jalan lapang bagi pergerakan nasional yang berhaluan nasionalisme sekuler. Perserikatan Nasional Indonesia yang berdiri pada 4 Juli

¹⁰³ Robert Van Niel, *Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2010), hlm. 302.

¹⁰⁴ Takashi Shiraishi, *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Belanda* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 93-94.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁰⁶ Robert Van Niel, *Op. Cit.*, hlm. 326-327.

¹⁰⁷ R.Z. Leirissa, *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 69.

1927 segera menjadi perhatian utama dan mengambil alih tempat utama dalam pergerakan nasional. Pergerakan nasional ke arah persatuan Indonesia semakin diperkuat setelah pada 28 Oktober 1928 para pemuda mendeklarasikan “Sumpah Pemuda” dalam Kongres Pemuda II di Batavia. Adapun deklarasi tersebut menyatakan: satu tanah air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.¹⁰⁸

Pada kurun waktu itu komunitas orang-orang Belanda juga semakin konservatif serta merasa sangat cemas dengan rapat-rapat umum yang besar, di mana Soekarno dan pemimpin-pemimpin lainnya dengan mencerca penguasa kolonial. Gubernur Jenderal A.C.D de Graeff, yang cenderung memihak politik etis, masih merasa enggan untuk mendukung penindasan secara umum. Meski demikian, pada 1928 dia mengirim Tjipto Mangunkusumo ke pengasingan di Banda Neira (hingga tahun 1941), memerintahkan penumpasan terhadap gerakan serikat buruh yang berhaluan kiri ketika pimpinan Serikat Kaum Buruh Indonesia ditangkap pada 1929, dan akhirnya pada tahun 1929 menangkap Soekarno beserta pemimpin-pemimpin PNI lainnya.¹⁰⁹

Pada tahun 1930-an telah nampak adanya suatu masyarakat baru, yang dapat dinamakan masyarakat Indonesia. Masyarakat baru ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang sudah sanggup membedakan antara identitas suku dan kepentingan nasional. Ciri-ciri masyarakat baru ini nampak dalam alam pikiran mereka yang tidak lagi terbatas pada alam pikiran tradisional. Cita-cita mereka mengarah pada suatu satuan politik baru yang terlepas dari ikatan-ikatan tradisional maupun kolonial Belanda. Indonesia Merdeka adalah semboyan paling ekstrim dari cita-cita itu.¹¹⁰

Selain itu, peristiwa lain yang juga mengguncang Hindia Belanda adalah depresi ekonomi pada 1930, yang sebenarnya sudah mulai dirasakan sejak 1929. Krisis ekonomi ini menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara industri maju akibat melimpahnya produksi yang tidak diikuti oleh daya beli yang tinggi dari

¹⁰⁸ Keith Foulcher, *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 13.

¹⁰⁹ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 274.

¹¹⁰ R. Z. Leirissa, *Op. Cit.*, hlm. 68.

masyarakat.¹¹¹ Krisis ini mencapai puncaknya pada 1930-1934 dimana dilakukan pengurangan produksi dan jumlah buruh secara besar-besaran, termasuk di Hindia Belanda.

Pada 1931, de Graeff digantikan oleh Gubernur Jenderal de Jonge. Pergantian ini merupakan garis pemisah antara dua zaman politik kolonial Belanda di Indonesia dalam empat puluh tahun terakhir kekuasaan mereka. Perbedaan prinsip antara de Graeff dan de Jonge terletak pada garis etis dan non-etis. Tujuan utama politik kolonial pada masa de Jonge dititikberatkan pada mempertahankan *rust en orde*, ini berarti de Jonge menolak segala bentuk perubahan di masyarakat dan terutama sekali bila perubahan itu melancarkan gerakan pembaruan. Depresi ekonomi pada 1930-an dijadikan sebagai alasan untuk memandang arti perubahan-perubahan tersebut. Perubahan menuntut penambahan anggaran belanja dan tentu saja tidak mungkin dilakukan berhubung dengan kesukaran ekonomi. De Jonge tidak mempertahankan politik etis karena politik tersebut dianggap membuka celah kesempatan kepada radikalisme gerakan nasionalis.¹¹²

4.2 Perubahan Pandangan Liem Koen Hian: Menuju *Indonesiërschap*

Peristiwa-peristiwa ini tidak luput dari perhatian masyarakat Tionghoa peranakan di Hindia Belanda dan ikut berpengaruh juga dalam kehidupan mereka, termasuk Liem Koen Hian. Tahun 1925 Liem keluar dari *Pewartja Soerabaia* dan menjadi pemimpin redaksi *Soeara Publiek*. Peristiwa ini bersamaan waktunya dengan perubahan pandangannya setelah ia membaca dan makin banyak mengenal gagasan-gagasan dr. Tjipto Mangunkusumo. Ia setuju dengan pendapat Tjipto tentang perkembangan bertahap dari “bangsa Hindia Belanda” yang terdiri dari semua orang yang menganggap Hindia Belanda sebagai tanah airnya serta yang secara aktif ikut membantu mengembangkan negara itu. Kaum peranakan (Indo-Belanda, Tionghoa peranakan dan Arab peranakan) merupakan bagian dari anggota bangsa Hindia Belanda.¹¹³ Pemikiran Liem sejak 1927 dipengaruhi oleh

¹¹¹ Wilson, *Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 51.

¹¹² Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 43.

¹¹³ Leo Suryadinata. *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 53.

gagasan nasionalisme Hindia. Gagasan nasionalisme Hindia sendiri pertama kali dicetuskan oleh Douwess Dekker dan diperjuangkan melalui *Indische Partij*,¹¹⁴ gagasan ini kemudian dikembangkan Tjito Mangunkusumo menjadi *Indier Burgerschap*.¹¹⁵ Pemikiran Tjipto Mangunkusumo inilah yang menjadi cikal bakal gagasan *Indonesierschap* Liem Koen Hian. Di Surabaya, Liem tinggal di antara kaum nasionalis dan pekerjaannya sebagai seorang wartawan menyebabkan ia terus berhubungan dengan kaum nasionalis Indonesia. Hubungan yang hangat antara Liem dengan kaum nasionalis Indonesia di Surabaya ini nampak ketika Liem ditahan akibat boikot sepakbola di Surabaya tahun 1932, ia dibebaskan karena tekanan dari para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti M. H. Thamrin dan Soetomo. Kontak yang intens dengan kaum nasionalis Indonesia ini juga mempengaruhi pemikiran Liem Koen Hian.

Pada dasarnya pemikiran Liem Koen Hian memperjuangkan persamaan kedudukan atas dasar kemanusiaan. Ia menentang diskriminasi rasial yang secara sistematis dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Soeal-Soeal dari Tionghoa Peranakan” ia menceritakan sebuah diskriminasi yang dialaminya sendiri ketika ia berada dalam tahanan akibat *persdelict*. Liem mempertanyakan mengapa para tahanan dari golongan Eropa dan Jepang memperoleh perlakuan lebih baik daripada tahanan dari golongan Tionghoa. Ia mencontohkan bahwa hanya orang Eropa dan Jepang yang diperbolehkan menggunakan sepatu di dalam tahanan. Selain itu tahanan Eropa dan Jepang mendapatkan kasur serta kelambu untuk tidur, berbeda dengan golongan lainnya yang hanya bisa tidur di bangku beton selebar setengah meter. Makanan para tahanan pun juga dibedakan berdasarkan golongan rasnya. Liem membandingkan perlakuan buruk yang diterimanya akibat *persdelict* dengan perlakuan baik yang diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada seorang tahanan berkebangsaan Jepang yang ditahan karena melakukan usaha prostitusi ilegal.¹¹⁶ Tulisan Liem tersebut menyindir kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa. Ia memprotes perlakuan tidak adil yang diterimanya

¹¹⁴ Wilson, *Op.Cit.*, hlm. 104.

¹¹⁵ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 53.

¹¹⁶ Liem Koen Hian. “Soeal-Soeal dari Tionghoa Peranakan” dalam *Soeara Publiek*, 27 Juli 1927.

hanya karena kebangsaannya sebab kebangsaan tidak dapat dijadikan dasar untuk membedakan derajat seseorang.

Dalam perkembangan selanjutnya nasionalisme Indonesia semakin pesat dan pertentangan antara bangsa Indonesia dengan Belanda terus meruncing. Melihat kenyataan itu Liem yakin bahwa tidak lama lagi Indonesia akan merdeka. Tionghoa peranakan tentu mau tidak mau akan terlibat dalam pertentangan tersebut. Dalam pertentangan tersebut, Liem berpendapat bahwa Tionghoa peranakan harus bergabung dalam kebangsaan Indonesia. Dalam sebuah rapat umum, seorang wartawan *Pewarta Soerabaia* bernama Siauw Biauwan San mendebat pandangan Liem. Siauw mengemukakan bahwa Tionghoa peranakan sebaiknya bersikap netral dalam pertentangan antara Indonesia dan Belanda, tidak turut campur dalam konflik tersebut, dan tetap menjadi orang asing di Hindia Belanda. Menanggapi pernyataan Siauw tersebut, Liem menjawab bahwa bila tiba saatnya pertentangan antara bangsa Indonesia yang dijajah dengan bangsa Belanda yang menjajah itu, mau tidak mau kaum Tionghoa peranakan akan terlibat juga sehingga Tionghoa peranakan harus segera menentukan di pihak mana mereka akan turut berjuang.¹¹⁷

Tanggapan itu mengundang banyak pertentangan dari berbagai pihak. Bahkan ada yang mengecam perubahan pemikiran Liem Koen Hian dari seorang nasionalis Cina menjadi nasionalis Indonesia. *Sin Po* menuduh Liem Koen Hian melakukan kebohongan; dengan menjadi seorang nasionalis Cina palsu atau berpura-pura menjadi nasionalis Indonesia. Melalui surat kabar *Soeara Publiek* Liem menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa perubahan pemikiran dari seorang nasionalis Cina menjadi nasionalis Indonesia adalah hal yang wajar dan sangat mungkin sebab tidak ada pertentangan diantara kedua paham tersebut.¹¹⁸ Oleh karena tidak ada pertentangan antara nasionalisme Cina dan nasionalisme Indonesia maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam perubahan haluan tersebut. Dalam tulisannya yang lain Liem menambahkan bahwa terjadinya perubahan haluan itu wajar sebab zaman terus berubah, apa yang

¹¹⁷ Liem Koen Hian. "Tiga Aliran Politiek dalam Doenia Tionghoa-Peranakan III" dalam *Sin Tit Po*, 27 Agustus 1932.

¹¹⁸ Liem Koen Hian. "Dari Nationalist Tionghoa djadi Nationalist Indonesier" dalam *Soeara Publiek*, 22 Februari 1928.

sesuai di suatu zaman belum tentu sesuai di zaman yang lain.¹¹⁹ Perubahan pemikiran Liem Koen Hian adalah hasil dari kemampuannya membaca perubahan-perubahan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di Hindia Belanda telah mengubah keyakinannya mengenai kedudukan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda.

Liem kemudian menjelaskan alasan mengapa ia melepaskan haluan nasionalisme Cina dalam harian *Sin Tit Po* dimana ia menjadi pemimpin redaksinya. Liem melihat bahwa nasionalisme Cina yang dianut oleh golongan *Sin Po* telah memperlihatkan gejala ultra-nasionalisme yang tidak menghormati bangsa lain, sehingga dapat menjadi sumber permusuhan dengan bangsa Indonesia di kemudian hari. Perasaan kebangsaan yang berlebihan akan berakibat kesombongan dan dapat mendorong ambisi imperialisme. Selain itu, nasionalisme Cina tidak ada gunanya bagi Tionghoa peranakan yang nasibnya terikat pada Hindia Belanda. Kepentingan Tionghoa peranakan tidak ada sangkut pautnya dengan negeri Cina. Nasionalisme Cina hanya berguna bagi orang-orang Tionghoa di negeri Cina sendiri, seperti yang diturkannya sebagai berikut:

... boeat bangsa Tionghoa di Tiongkok nasionalisme masih bisa dipake sabagi sendjata boeat oesir moesoeh dari negrinja, boeat Tionghoa peranakan itoe sendjata tida ada goenanja. Moesoeh mana jang peranakan di sini hendak perang dan oesir sama itoe sendjata? Dengan memaen sama nasionalisme, peranakan tjoema bisa pake itoe sendjata boeat boenoeh diri sendiri dale mini waktoe dan di blakang hari, kaloe Tiongkok soeda djadi koeat, boeat berboeat djahat pada bangsa Indonesia seperti kaoem imperialist di Tiongkok sekarang.¹²⁰

Nasionalisme Cina membuat Tionghoa peranakan melupakan kepentingannya yang nyata di Indonesia, dimana Tionghoa peranakan hidup dan bekerja. Cina hanyalah negeri asing bagi Tionghoa peranakan, segala yang terjadi di sana tidak ada sangkut pautnya dengan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Liem berpendapat bahwa kaum Tionghoa peranakan seharusnya tidak terus menerus menjadi orang asing di Hindia Belanda yang tidak ikut campur tangan sama sekali dengan apa yang terjadi di Hindia Belanda. Kedudukan kaum Tionghoa peranakan

¹¹⁹ Liem Koen Hian. "Haloean Kita V" dalam *Sin Tit Po*, 14 April 1930.

¹²⁰ Liem Koen Hian. "Haloean Kita II" dalam *Sin Tit Po*, 10 April 1930.

dapat diperbaiki hanya melalui keikutsertaan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka.

Alasan-alasan itulah yang mendasari perubahan haluan Liem Koen Hian dari seorang nasionalis Cina menjadi seorang nasionalis Indonesia. Perkembangan nasionalisme Indonesia dan hubungan baiknya dengan kaum nasionalis Indonesia membuat Liem akhirnya memilih menjadi seorang nasionalis Indonesia. Akan tetapi pada intinya apa yang diperjuangkan Liem Koen Hian tidak berubah. Pemikirannya mencita-citakan kemerdekaan, persamaan derajat, dan emansipasi kemanusiaan bagi Tionghoa peranakan pada khususnya dan bagi setiap bangsa pada umumnya. Ketika nasionalisme Cina menurutnya tidak dapat digunakan untuk mencapai cita-cita tersebut maka ia mengubah haluannya menjadi nasionalisme Indonesia. Liem menolak nasionalisme sempit yang menganggap rendah bangsa lain.¹²¹ Pandangan dasar Liem mengenai persamaan derajat atas dasar kemanusiaan tergambar dalam kata-katanya sebagai berikut: “Kita poenja manoesia berdiri di tanah sama kedoea kakinja seperti djoega si nationalist, aken tetapi sedeng si nationalist lebih oetamakan tjap dari pada orangnja, kita lebih pandeng orangnja dari pada tjapnja.”¹²²

4.3 *Indonesierschap*

Nasionalisme Indonesia yang semakin berkembang sejak 1927 juga mulai tumbuh di dalam masyarakat Tionghoa peranakan.¹²³ Mulai menyebarnya nasionalisme Indonesia hingga ke dalam masyarakat Tionghoa peranakan ini mendorong Liem Koen Hian untuk mulai merumuskan haluan baru bagi kaum Tionghoa peranakan. Menurut Liem, orientasi ke negeri Cina, haluan yang disuarakan oleh golongan *Sin Po*, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi.¹²⁴ Pada awal tahun 1928 Liem mulai menyuarakan haluan baru bagi golongan Tionghoa peranakan. Ia mengajak kaum

¹²¹ Liem Koen Hian. “Haloean Kita I” dalam *Sin Tit Po*, 9 April 1930.

¹²² Liem Koen Hian. “Haloean Kita V” dalam *Sin Tit Po*, 14 April 1930.

¹²³ Liem Koen Hian. “Soeal-Soeal dari Tionghoa Peranakan II” dalam *Soeara Publiek*, 28 Juli 1927.

¹²⁴ Liem Koen Hian. “Satoe Program van Actie Boeat Indonesier dan Tionghoa Bersama-sama” dalam *Soeara Publiek*, 10 Januari 1928.

Tionghoa peranakan untuk bergabung dalam kebangsaan Indonesia dan ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.¹²⁵

Haluan baru yang diutarakan oleh Liem ini segera mengundang berbagai reaksi dan perdebatan. Kaum Tionghoa peranakan yang berorientasi ke negeri Cina segera menentang haluan tersebut dengan berargumen bahwa orang-orang Tionghoa dan Indonesia berbeda ras. Liem menyanggah paham kebangsaan yang berdasarkan ras itu. Ia menuliskan sanggahan terhadap paham kebangsaan berdasarkan ras tersebut dengan menjelaskan bahwa:

Indonesia dan Indonesier adalah nama-nama jang mempoenjai artian politiek, jang mengandoeng angen-angen politiek, jaitoe mendirikan negri Hindia jang merdika, jang bernama Indonesia dengan rajatnja jang merdika, bangsa Indonesier.

Dalem itoe artian politiek dari itoe nama, seorang Tionghoa peranakan di sini, kendati terlahir dari iboe-bapa totok tapi kaloe ia trima kerajatan Blanda, tinggal teroes dale mini negri, akoe ini negri seperti tanaeh aernja, jang kasi ia hawa boeat menapas dan pengasilan boeat samboeng djiwanja dan maoe bekerdja sama-sama dengan orang Boemipoetra boeat boeroe angen-angen jang dikandoeng oleh itoe nama Indonesia dan Indonesier – dalem itoe artian politiek seorang Tionghoa peranakan begitoe ada satoe Indonesier, tida perdoeli dalem toeboehnja ada mengalir 100 pCt atawa 10 pCt darah Tionghoa.¹²⁶

Definisi Liem mengenai kebangsaan Indonesia ini mendasarkan kebangsaan pada persamaan nasib, kepentingan, dan cita-cita. Konsep kebangsaan Indonesia yang dibangun Liem serupa dengan pemikiran Ernest Renan yang mengungkapkan bahwa bangsa adalah suatu kelompok manusia yang ingin bersatu. Dalam pemikiran Liem, jika seorang Tionghoa peranakan memiliki keinginan untuk bergabung dalam kebangsaan Indonesia dan bersedia ikut serta mewujudkan negara Indonesia merdeka maka ia telah menjadi Indonesia.

Pada 1930 Liem semakin memperjelas haluan yang dicetuskannya. Ia yakin bahwa akan datang suatu masa ketika Tionghoa peranakan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Haluan baru yang

¹²⁵ Liem Koen Hian. "Toedjoean Kita" dalam *Soeara Publiek*, 2 Februari 1928.

¹²⁶ Liem Koen Hian. "Tionghoa Peranakan Djadi Indonesier" dalam *Soeara Publiek*, 20 Februari 1928.

dicetuskannya itu diberi nama *Indonesierschap*.¹²⁷ Menurut Liem adalah suatu hal yang sangat alamiah apabila Tionghoa peranakan merasa terikat pada Indonesia dan menganggap Indonesia sebagai tanah airnya. Ikatan Tionghoa peranakan tidak hanya karena kepentingannya saja ada di Indonesia, melainkan lebih dari itu. Rasa cinta kepada tanah air akan tumbuh secara alamiah sebab Indonesia adalah tempat tinggal Tionghoa peranakan. Persamaan budaya, hubungan kekeluargaan, hubungan pergaulan sehari-hari, dan persamaan kepentingan antara kaum bumiputra Indonesia dan Tionghoa peranakan pada akhirnya akan menciptakan perasaan sebagai satu bangsa.¹²⁸ Dalam pengertian ini, pemikiran Liem memiliki kesamaan dengan pemikiran Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa adalah suatu komunitas-karakter yang tumbuh dari suatu komunitas dengan pengalaman yang sama.

Lebih lanjut Liem mengungkapkan bahwa Tionghoa peranakan adalah bagian dari bangsa Indonesia juga oleh karena adanya hubungan secara genealogis. Secara kultural pun Tionghoa peranakan dalam pandangan Liem sangat dekat dengan bangsa Indonesia. Maka menurut Liem, Tionghoa peranakan bukanlah ‘orang asing’ yang tidak perlu turut campur dalam perjuangan rakyat Indonesia seperti yang didengung-dengungkan oleh *Sin Po*. Tionghoa peranakan memiliki ‘kewajiban suci’ untuk ikut memerdekakan Indonesia sebab mereka juga bagian dari bangsa Indonesia.¹²⁹

Liem Koen Hian semakin memperjelas konsep *Indonesierschap*-nya ketika ia menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Sin Tit Po*. Ia menjelaskan pengertian *Indonesierschap* dalam “Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan” yang dimuat di koran *Sin Tit Po*, sebagai berikut:

Perkataan Indonesier bisa berarti seorang Indonesier aseli, jaitoe artian etnologisch dan djoega bisa berarti rajat dari negri Indonesia, jaitoe artian staatkundig. Seperti djoega perkataan Nederlander bisa berarti seorang Blanda totok, tetapi bisa djoega berarti seorang Duits totok, seorang Inggris totok atawa seorang Tionghoa totok. Begitoe poen

¹²⁷ Liem Koen Hian. “Ka Indonesierschap” dalam *Sin Tit Po*, 2 April 1930.

¹²⁸ Liem Koen Hian. “Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan II” dalam *Sin Tit Po*, 26 Agustus 1932.

¹²⁹ Liem Koen Hian. “Causerie Pikiran Indonesia dan Pranakan Tionghoa” dalam *Djawa Tengah*, 12 Oktober 1932.

dengan perkataan Amerikaan, seorang Amerikaan, tida dimaksoedken meloeloe seorang kulit merah, orang Amerkaan aseli, aken tetapi seorang Amerikaan itoe bisa sekali ada seorang peranakan atawa totok Ier, seorang peranakan atawa totok Duits, seorang peranakan atawa totok Italie, jang soeda djadi rajat Amerika.

Maka itoe sama sekali tida ada anehnja, djikaloe perkataan Indonesier tida sadja berarti seorang Indonesier aseli, tetapi djoega berarti seorang jang djadi rajat ini negeri. Dengan laen perkataan, perkataan Indonesier tida moesti tjoema berarti seorang Indonesier aseli sadja.¹³⁰

Liem membayangkan bahwa negara Indonesia serupa dengan Amerika Serikat, sebuah negeri yang terdiri dari berbagai golongan ras, budaya, dan agama tetapi semuanya mengakui dirinya sebagai bagian dari bangsa Amerika. Di Amerika Serikat, kaum pendatang yang bukan penduduk bumiputra dapat bergabung dalam kebangsaan Amerika Serikat dengan penduduk bumiputra, Liem pun menginginkan hal serupa juga dapat terjadi di Indonesia. Liem menganggap perbedaan antara seorang Tionghoa peranakan dengan seorang Jawa sama halnya dengan perbedaan antara seorang Sunda dengan seorang Sumatra.¹³¹ Konsep kebangsaan Amerika Serikat diambil Liem sebagai contoh karena ia melihat adanya persamaan antara bangsa Amerika Serikat dan bangsa Indonesia. Indonesia, juga terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya seperti halnya Amerika Serikat. Definisi *Indonesierschap* yang dikemukakan Liem ini memperlihatkan bahwa menurut Liem, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbentuk atas dasar persamaan nasib, penindasan yang dialami bersama, dan perjuangan bersama untuk kemerdekaan. Pengertian demikian merupakan landasan untuk menetapkan kedudukan kaum Tionghoa peranakan di dalam negara Indonesia yang dalam keyakinan Liem akan segera terbentuk. Bentuk negara Indonesia yang dicita-citakan Liem adalah sebuah negara demokratis dan multikultural seperti Amerika Serikat, dimana Tionghoa peranakan dan golongan-golongan lainnya dalam kebangsaan Indonesia akan mendapatkan kedudukan yang sama.

Namun konsep *Indonesierschap* Liem Koen Hian ini tidak mudah diterima pada zamannya. Pemerintah kolonial melakukan pemisahan antar ras dimana golongan Tionghoa (*Vreemde Osterlingen* bersama orang-orang Arab dan India)

¹³⁰ Liem Koen Hian. "Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan II", *loc. cit.*

¹³¹ Liem Koen Hian. "Apa Baba bisa Menjadi Indonesier" dalam *Mata Hari*, 8 September 1934.

berada diantara golongan Eropa dan Bumiputra dalam stratifikasi sosial di Hindia Belanda. Orang-orang Tionghoa menerima perlakuan dan kedudukan yang berbeda dengan orang-orang bumiputra. Konsep ini diterima dengan kecurigaan oleh mayoritas tokoh pergerakan nasional pada waktu itu. Orang-orang Tionghoa peranakan pun banyak yang menolak karena beranggapan bahwa menjadi satu bangsa dengan Bumiputra berarti penurunan derajat dalam stratifikasi sosial. Maka untuk mewujudkan konsep *Indonesierschap*-nya, Liem mengusulkan penghapusan peraturan hukum yang membedakan kedudukan setiap golongan berdasarkan ras sebab pembedaan status dalam masyarakat itu merupakan penghalang bagi penyatuan Tionghoa peranakan ke dalam bangsa Indonesia.¹³²

Indonesierschap yang digagas Liem ini juga mengundang sebuah pertanyaan besar mengenai apakah orang-orang Tionghoa peranakan harus melebur atau melakukan asimilasi total ke dalam golongan Bumiputra. Namun Liem mengesampingkan permasalahan ini dan menekankan bahwa pertama-tama yang terpenting adalah terlebih dahulu menyebarkan kesadaran kepada masyarakat Tionghoa peranakan bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Menurut pemikiran Liem, peleburan antara golongan Tionghoa peranakan dan Bumiputra cepat atau lambat akan terjadi secara alamiah tanpa perlu dipermasalahkan dan dicampuri setelah Indonesia merdeka, persamaan kedudukan di negara Indonesia akan mendorong persatuan yang lebih erat antara kaum Bumiputra dan Tionghoa peranakan.¹³³ Ia menolak anggapan bahwa Tionghoa peranakan harus mengganti nama, agama, kawin campur, dan sebagainya untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mengenai hal ini, Liem menulis sebagai berikut:

Demikianlah sedeng nama kita tetep nama Tionghoa dan tida perloe digantie sama nama Indonesier, *ons volen en denken*, kita poenja perasaan dan pikiran, kita berasa dan berpikir seperti seorang Indonesier. Seperti djoega seorang Blanda-Amerikaan atawa seorang Duits-Amerikaan atawa seorang Ier- Amerikaan tida perloe robah ia poenja nama toeroenan, tapi toch bisa sekali berasa dan berpikir seperti seorang Amerikaan, begitoe poen kita orang tida perloe robah kita poenja nama Tionghoa itoe.¹³⁴

¹³² Liem Koen Hian. "Ka Indonesierschap", *loc. cit.*

¹³³ Liem Koen Hian. "Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan II", *loc. cit.*

¹³⁴ Liem Koen Hian. "Haloean Kita V", *loc. cit.*

Tampak ada kecenderungan dari Liem untuk menganjurkan Tionghoa peranakan agar tetap mempertahankan identitas sebagai Tionghoa peranakan tetapi ia juga tidak menolak asimilasi atau peleburan ke dalam golongan Bumiputra asalkan asimilasi itu terjadi tanpa paksaan. Ketika koran *Sin Po* menakut-nakuti orang-orang Tionghoa peranakan dengan mengatakan bahwa haluan *Indonesierschap* mengharuskan orang-orang Tionghoa masuk Islam, Liem menjawab:

Sekarang di mana-mana negeri pemerintah tinggal neutral dalam oeroesan agama, mengertinja tida toeroet menjataken lebih soeka sama agama jang ini dari pada jang laen. Tapi lebih penting dari sekalian pertimbangan laen adalah halnja di Tiongkok sendiri, antara bangsa Tionghoa sendiri, ada millioenan orang jang peloeok agama Islam. Orang-orang Islam telah mendjabat pangkat-pangkat tinggi di Tiongkok.¹³⁵

Walaupun cenderung menganjurkan untuk mempertahankan identitas sebagai Tionghoa peranakan, Liem sama sekali tidak mempermasalahkan jika Tionghoa peranakan pindah agama memeluk agama Islam atau berasimilasi ke dalam masyarakat Bumiputra. Namun ia tidak ingin negara atau pihak-pihak lain memaksakan peleburan tersebut. Liem menginginkan proses percampuran terjadi dengan sendirinya dalam negara Indonesia yang demokratis dan multikultural.

Gagasan *Indonesierschap* tetap dipertahankan Liem ketika ia diangkat menjadi anggota BPUPKI sebagai salah satu wakil dari golongan peranakan Tionghoa. Dalam pidatonya di BPUPKI, Liem mengemukakan pendapatnya bahwa sebenarnya sebagian besar golongan peranakan Tionghoa menyetujui haluan *Indonesierschap* yang diperjuangkan PTI namun mereka tidak berani menyatakan persetujuannya secara terbuka. Dukungan masyarakat Tionghoa peranakan terhadap PTI terlihat dari kemenangan PTI dalam pemilihan wakil-wakil golongan Timur Asing untuk Dewan Kota Surabaya. Kelima kursi yang disediakan untuk golongan Timur Asing dapat direbut oleh PTI, begitu pula dalam *Volksraad*, PTI memiliki wakil. Liem juga menambahkan bahwa sebagian besar golongan peranakan Tionghoa tidak mengerti urusan politik sehingga akan kebingungan bila disuruh memilih antara kewarganegaraan asing dan

¹³⁵ Liem Koen Hian. "Menjesatken Pambatja" dalam *Sin Tit Po*, 7 April 1930.

kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, Liem mengusulkan agar semua Tionghoa peranakan ditetapkan menjadi warga negara Indonesia tetapi diberi kesempatan untuk menolak bagi yang tidak ingin menjadi warga negara Indonesia.¹³⁶ Akan tetapi usulan Liem ini ditolak, BPUPKI memutuskan bahwa hanya etnis-etnis bumiputra Indonesia saja yang akan langsung menjadi warga negara Indonesia sedangkan yang lainnya akan dikukuhkan sebagai warga negara dengan hukum. Penolakan ini menyebabkan Liem keluar dari BPUPKI pada 16 Juli 1945.¹³⁷

Pada masa revolusi, Liem tetap berpegang pada pendirian nasionalisme Indonesia. Ia mempropagandakan nasionalisme Indonesia di antara kaum peranakan. Liem diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)¹³⁸ dan pada Perundingan Renville (1948)¹³⁹, ia menjadi salah seorang anggota delegasi Republik Indonesia.¹⁴⁰

4.4 Partai Peranakan Tionghoa untuk Mewujudkan *Indonesierschap*

Pada tahun 1927 Chung Hwa Hui (CHH) muncul sebagai partai Tionghoa peranakan yang berorientasi ke Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, CHH mendapat banyak kecaman karena sikapnya yang oportunistis dan sangat pro-Belanda di dalam *Volksraad*. Sikap CHH seringkali bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Fraksi Nasional di dalam *Volksraad*. Misalnya dalam persoalan penghapusan *Poenale Sanctie*, penghapusan

¹³⁶Ananda B. Kusuma, ed., et. al., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hlm. 167-172.

¹³⁷Arifin Suryo Nugroho dan Ipong Jazimah, *Detik-Detik Proklamasi: Saat-saat Menegangkan Menjelang Kemerdekaan Republik* (Yogyakarta: Narasi, 2011), hal. 62.

¹³⁸KNIP adalah badan yang dibentuk oleh PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Badan ini dibentuk karena Republik Indonesia yang baru berdiri saat itu belum bisa mengadakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk sementara waktu hingga diadakannya pemilu, KNIP menjalankan fungsi-fungsi parlemen menggantikan DPR, lihat Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda* (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 113 – 117.

¹³⁹Persetujuan untuk meredakan konflik antara Indonesia dan Belanda ini ditandatangani di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville pada 19 Januari 1948. Dalam perundingan Renville, delegasi RI dipimpin oleh Amir Syarifuddin, seorang kawan Liem pada masa pergerakan nasional sekaligus mantan pemimpin Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang sejak Juli 1947 menjadi Perdana Menteri RI, lihat M. C. Ricklefs, *Op. Cit.*, hlm. 338-340.

¹⁴⁰M. P. B. Manus, et. al., *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 137-138.

Exorbitante Rechten, dan usul mengenai mayoritas bumiputra di dalam *Volksraad*, CHH memberikan suara tidak setuju.

Sikap CHH ini dianggap membahayakan kaum Tionghoa peranakan pada umumnya. Liem khawatir sikap CHH ini akan menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia terhadap Tionghoa peranakan yang sebenarnya sebagian besar diantaranya tidak mendukung pendirian CHH. Ia menilai bahwa haluan CHH itu hanya mewakili sekelompok kecil Tionghoa peranakan kaya yang kepentingan terikat erat dengan Belanda sebab kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan mereka bergantung pada pemerintah kolonial Hindia Belanda.¹⁴¹ Maka untuk memperbaiki citra buruk kaum Tionghoa peranakan akibat sepak terjang CHH, perlu didirikan organisasi Tionghoa lain guna menandingi CHH dan menunjukkan kepada golongan Bumiputra bahwa tidak semua orang Tionghoa peranakan mendukung CHH.¹⁴²

Pemikiran Liem mengenai kebutuhan akan sebuah partai peranakan Tionghoa yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia ini juga dipengaruhi oleh menguatnya kesadaran mengenai adanya persamaan nasib dan kepentingan antara golongan Tionghoa peranakan dengan Bumiputra. Perasaan senasib dengan rakyat bumiputra ini timbul akibat guncangan Depresi Besar yang menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum di Hindia Belanda, tidak terkecuali kaum Tionghoa peranakan.¹⁴³ Dengan semakin bertambah banyaknya orang Tionghoa peranakan yang mendukung haluan *Indonesierschap* pada 1930-an, maka menurut Liem sudah saatnya konsep *Indonesierschap* diwujudkan dalam bentuk gerakan yang nyata. Perjuangan mewujudkan *Indonesierschap* akan menjadi lebih kuat dan berhasil dengan adanya partai yang menyokong dan menjalankan program-program untuk mewujudkannya.¹⁴⁴

Partai baru yang didirikan untuk mewujudkan *Indonesierschap* ini dinamakan Partij Tionghoa Indonesia (PTI). Liem membuat perbedaan antara PTI

¹⁴¹ Liem Koen Hian. "Haloean Kita III" dalam *Sin Tit Po*, 11 April 1930.

¹⁴² Liem Koen Hian. "Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan I" dalam *Sin Tit Po*, 25 Agustus 1932.

¹⁴³ Liem Koen Hian. "Indonesia...Tanah Aer-koel!" dalam *Sin Tit Po*, 10 September 1938.

¹⁴⁴ Liem Koen Hian. "Partij Tionghoa Indonesia" dalam *Sin Tit Po*, 6 September 1932.

dan CHH dengan menyatakan bahwa dalam PTI hanya ada tempat bagi orang-orang yang berniat mengabdikan dengan tulus pada tanah air Indonesia, bersedia merasakan ‘pahit manisnya’ perjuangan kemerdekaan Indonesia.¹⁴⁵ Demikianlah Liem menginginkan PTI tidak menjadi partai peranakan Tionghoa yang pro-Belanda dan oportunis seperti CHH. PTI mendapatkan dukungan terutama dari orang-orang Tionghoa peranakan kelas menengah ke bawah, berbeda dengan CHH yang didukung para opsir, tuan tanah, pengusaha besar, dan cendekiawan yang kepentingannya terikat dengan pemerintah kolonial Belanda.¹⁴⁶ PTI juga sekaligus merupakan alat pendidikan politik bagi Tionghoa peranakan sebab sebagian besar masyarakat Tionghoa peranakan pada masa itu masih belum menyadari bahwa kepentingannya terikat dengan bangsa Indonesia.¹⁴⁷ Melalui PTI, Liem ingin mengubah persepsi umum kaum Bumiputra terhadap Tionghoa peranakan dan juga sebaliknya persepsi orang-orang Tionghoa peranakan terhadap Bumiputra. Ia ingin menunjukkan pada kaum Bumiputra bahwa Tionghoa peranakan benar-benar bagian dari bangsa Indonesia yang siap berkorban untuk kemerdekaan Indonesia serta bukan kaum oportunis yang hanya mengejar keuntungan di bumi Indonesia. Kepada kaum Tionghoa peranakan ia ingin menanamkan kesadaran bahwa Tionghoa peranakan bukan orang asing, melainkan bagian dari bangsa Indonesia, dan kepentingannya terikat erat dengan bangsa Indonesia.

Azas perjuangan yang dipilih PTI adalah kooperasi. PTI memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui dewan-dewan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam tulisannya yang berjudul *Causerie Pikiran Indonesia dan Pranakan Tionghoa*, Liem menyatakan pendapatnya bahwa kemerdekaan Indonesia juga bisa dicapai dengan cara evolusioner melalui dewan-dewan bentukan pemerintah kolonial. Bantuan dan kerjasama antara PTI dan organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia diyakini akan membantu tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia.¹⁴⁸ Pilihan ini tentu bukannya diambil tanpa pertimbangan. Setelah pemberontakan PKI tahun 1926, pemerintah kolonial

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Djawa Tengah*, 11 Oktober 1932.

¹⁴⁷ Liem Koen Hian. “Indonesia....Tanah Aer-koel!”, *loc. cit.*

¹⁴⁸ Liem Koen Hian. “Causerie Pikiran Indonesia dan Pranakan Tionghoa”, *loc. cit.*

semakin reaksioner terhadap organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ruang gerak bagi pergerakan nasional semakin dipersempit, organisasi-organisasi yang dicap radikal-revolusioner akan segera dibubarkan, satu-satunya tempat dimana organisasi-organisasi pergerakan nasional dapat leluasa adalah di dalam *Volksraad*. Perjuangan evolusioner melalui dewan-dewan bentukan pemerintah kolonial adalah jalan paling masuk akal bagi PTI. Selain itu, Liem tampaknya menyadari bahwa revolusi menyimpan bahaya bagi kaum Tionghoa peranakan. Sebagai kelas menengah perantara, golongan Tionghoa akan digunakan kambing hitam oleh penguasa jika terjadi revolusi. Lagipula perjuangan revolusioner tidak populer di kalangan Tionghoa peranakan.

Dalam kampanyenya prinsip-prinsip yang dikemukakan PTI tidak banyak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh PNI-baru, Parindra, dan Gerindo. Dengan demikian tergalanglah hubungan baik dengan partai-partai pergerakan nasional Indonesia.¹⁴⁹

Namun partai peranakan Tionghoa yang berorientasi ke Indonesia hanya dibutuhkan selama organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia belum mau menerima orang-orang Tionghoa peranakan sebagai anggota. Konsep *Indonesiërschap* Liem Koen Hian menghendaki persatuan antara kaum Bumiputra dan Tionghoa peranakan sehingga partai peranakan Tionghoa justru malah akan menjadi penghalang persatuan ketika organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia membuka keanggotaannya bagi Tionghoa peranakan. Masuknya kaum Tionghoa peranakan ke dalam organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia akan menjadi bukti kesungguhan niat untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Pada 1938 sebuah tulisan dalam koran *Pewartu Deli* mengkritik kaum peranakan (Tionghoa dan Arab) yang menyatakan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia namun justru membuat partai-partai sendiri (PTI, PAI, dan sebagainya) dan tidak bergabung dalam organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Melalui koran *Sin Tit Po*, Liem menanggapi pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa bukan golongan peranakan yang harus disalahkan jika mereka mendirikan partai-partai sendiri dan tidak bergabung ke dalam partai-partai nasional. Kaum

¹⁴⁹ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm. 504.

peranakan berjuang melalui partai-partai tersendiri karena partai-partai pergerakan nasional Indonesia tidak mau menerima mereka sebagai anggota. Jika organisasi-organisasi pergerakan nasional bersedia membuka keanggotaannya bagi golongan peranakan, golongan peranakan akan segera membuktikan kesungguhan hatinya untuk ikut berjuang bersama memerdekakan Indonesia.¹⁵⁰ Liem membuktikan pernyataannya ini ketika pada tahun 1939 Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) mulai membuka keanggotaannya bagi kaum peranakan. Liem melepaskan keanggotaannya di PTI dan bergabung ke dalam Gerindo.¹⁵¹ Langkah Liem ini merupakan realisasi dari gagasan *Indonesierschap* yang diperjuangkannya sejak 1928.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Belanda yang hendak menguasai kembali Indonesia membentuk Persatuan Tionghoa di daerah-daerah yang didudukinya untuk memisahkan golongan Tionghoa dari bangsa Indonesia. Liem menentang keras pembentukan Persatuan Tionghoa yang dianggapnya semata-mata alat kekuasaan Belanda seperti halnya CHH. Keberadaan Persatuan Tionghoa dinilai Liem menghalangi pembauran golongan Tionghoa ke dalam bangsa Indonesia yang baru merdeka. Persatuan Tionghoa juga memberikan kesan bahwa golongan Tionghoa tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Untuk mengubah persepsi bahwa golongan Tionghoa tidak mendukung kemerdekaan Indonesia, sekali lagi Liem mendirikan partai yang dinamakannya Persatuan Tenaga Indonesia (PTI-Baru) pada 26 Februari 1950. Dalam pidato pembukaan PTI-Baru, Liem menyatakan:

... perlu diberi teladan bagaimana sekarang semua warga negara dari RIS, tak peduli apa kebangsaannya yang asal bisa bekerja sama-sama dengan tergabung di dalam sebuah organisasi. Itulah sebabnya maka Persatuan Tenaga Indonesia (*Union of Indonesian Forces*) membuka pintunya untuk segala warga negara RIS, tak peduli apa kebangsaannya yang asal, asal saja sama paham dan sama tujuannya.¹⁵²

Pernyataan Liem tersebut jelas menunjukkan bahwa ia ingin mewujudkan *Indonesierschap* melalui PTI-Baru. Dalam konsep *Indonesierschap*, kebangsaan

¹⁵⁰ Liem Koen Hian. "Paham Kita" dalam *Sin Tit Po*, 15 Oktober 1938.

¹⁵¹ R. N. Bayu Aji, *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 30.

¹⁵² Liem Koen Hian, "Perlunya Ada Partai Politik Baru," *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa 1900 – 2002*, ed. Leo Suryadinata (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 216.

Indonesia didasari oleh persamaan keinginan untuk mengabdikan pada tanah air Indonesia; hubungan pergaulan serta persamaan kepentingan antara Tionghoa peranakan dan bumiputra Indonesia akan timbul melalui kerjasama terus menerus sehingga menimbulkan rasa persatuan yang kuat. Oleh karena itu, berbeda dengan PTI pada masa pergerakan nasional yang hanya diperuntukkan bagi golongan Tionghoa, keanggotaan PTI-Baru terbuka bagi semua warga negara Indonesia. PTI-Baru ingin mendorong terciptanya hubungan yang erat antara kaum bumiputra dan kaum Tionghoa peranakan sehingga golongan Tionghoa dapat diterima secara utuh dalam kebangsaan Indonesia. Melalui partai ini, Liem mencoba menjadi penyeimbang partai Persatuan Tionghoa yang dibentuk pada 1948 di daerah-daerah yang dikuasai Belanda.

4.5 Pilihan Akhir Liem Koen Hian: Tragedi bagi *Indonesierschap*

Pada Juni – Agustus 1951 timbul serangkaian pemogokan, sebuah granat tangan dilemparkan ke tengah kerumunan massa di Bogor, dan suatu gerombolan bersenjata yang berlencana palu-arit menyerang sebuah pos polisi. Pemerintahan Sukiman menuduh PKI sebagai dalang di balik aksi-aksi tersebut dan segera melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang yang dicurigai berhaluan kekiri-kirian.¹⁵³ Tanggal 11 Agustus para pemimpin PKI di Medan ditangkap. Beberapa hari kemudian menyusul suatu gelombang penangkapan besar-besaran di Jakarta, termasuk enam belas anggota parlemen. Berdasarkan keterangan dari pemerintah, sekitar 15.000 orang ditangkap. Tak seorang pun dari sekitar 15.000 orang yang ditangkap itu diajukan ke pengadilan.¹⁵⁴

Liem Koen Hian juga ikut ditangkap dan dijebloskan ke penjara dalam penangkapan besar-besaran ini dengan tuduhan menjadi agen Republik Rakyat Cina (RRC).¹⁵⁵ Ketika dibebaskan pada Oktober 1951, ia meninggalkan arena

¹⁵³ Pemerintahan Sukiman yang didominasi oleh orang-orang dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) memang dikenal sangat anti-komunis dan pro-Barat. Kabinet Sukiman jatuh pada Februari 1952 akibat skandal penandatanganan persetujuan bantuan militer dari Amerika Serikat. Orang-orang yang ditangkap oleh kabinet Sukiman pada Agustus 1951 kemudian dibebaskan seluruhnya oleh kabinet penggantinya (kabinet Wilopo), lihat M. C. Ricklefs, *Op. Cit.*, hlm. 365-367.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 365.

¹⁵⁵ M. P. B. Manus, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

politik dan melepas kewarganegaraan Indonesia. Liem meninggal pada 5 November 1952 sebagai seorang warga negara RRC.¹⁵⁶

Keputusan Liem untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia ini mengundang kontroversi. Menurut pengakuan Liem, ia melepaskan kewarganegaraan Indonesia karena ia kesal ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili.¹⁵⁷ Ia juga mengatakan bahwa ia kecewa dengan diskriminasi terhadap WNI keturunan Tionghoa yang dilakukan oleh pemerintah (Liem mencontohkan perlakuan diskriminatif yang diterima seorang kawannya, dokter Tjoa Siek Ien, yang tidak bisa mendapatkan pinjaman modal hanya karena dokter Tjoa adalah seorang WNI keturunan Tionghoa).¹⁵⁸ Liem memang sangat menentang diskriminasi. Ketidaksukaannya terhadap praktik-praktik diskriminasi sangat terlihat dalam tulisan-tulisannya sejak menjadi pimpinan redaksi *Sinar Soematra* dimana ia menentang diskriminasi ras yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, menentang ultranasionalisme golongan *Sin Po* yang merendahkan bangsa lain ketika dan juga memperjuangkan persamaan hukum untuk semua golongan ras di Hindia Belanda ketika bekerja di surat kabar *Soeara Publikek*, serta ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui harian *Sin Tit Po*.

Pada April 1950 pemerintah RIS memperkenalkan Sistem ekonomi “Program Benteng”. Sistem ekonomi ini memberikan perlindungan kepada “para pengusaha nasional” Indonesia agar dapat bersaing dengan pengusaha asing. Para pengusaha nasional itu kemudian didefinisikan sebagai para pengusaha bumiputra Indonesia atau perusahaan yang 70 persen modalnya dimiliki orang bumiputra. Perlakuan istimewa itu tidak dapat dirasakan oleh pengusaha non-bumiputra

¹⁵⁶Ananda B. Kusuma, ed., et. al., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hlm. 591.

¹⁵⁷Kekecewaan Liem akibat penangkapan terhadap dirinya ini semakin bertambah oleh sikap Achmad Soebardjo, salah seorang sahabatnya yang ketika itu menjadi Menteri Luar Negeri, yang mengabaikan permohonan bantuan untuk menolongnya ketika anak tunggalnya berusaha menemuinya. Padahal di zaman pergerakan nasional, Liem berkali-kali membantu Achmad Soebardjo meloloskan diri dari penangkapan Belanda, malahan pada situasi sangat berbahaya untuk dirinya, Liem Koen Hian mengusahakan agar Achmad Subardjo dapat melarikan diri ke Tokyo sambil bekerja sebagai pembantu tetap harian *Mata Hari*. Lihat Benny G. Setiono, *Op. Cit.*, hlm. 692.

¹⁵⁸Leo Suryadinata, “Liem Koen Hian: Peranakan yang Mencari Identitas,” *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*, ed. Ainin Dita Z (Jakarta, 2010), hlm. 88.

Indonesia. Salah seorang kawan Liem, dokter Tjoa Siek Ien, mendapat perlakuan diskriminatif akibat kebijakan ini. Tentu saja hal ini sangat mengecewakan Liem. Ia mendapati bahwa negara Indonesia yang merdeka tidak sesuai dengan harapannya. Dalam tulisan-tulisannya di zaman pergerakan nasional, Liem membayangkan bahwa Indonesia merdeka adalah negara demokratis dan multikultural yang memberikan tempat layak bagi setiap golongan.

Kegusaran Liem Koen Hian juga diceritakan oleh Tjoa Tjie Liang, salah seorang sahabat Liem, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Soe Hok Gie sebagai berikut:

Saja lalu mendengar desas-desus bahwa Liem maoe menjadi warganegara R.R.T. Tida makan tempo lama saja dapet kesempatan menemu dia di rumah'nja, saja tanja:

“Apa betul 'nko mau lepaskan warganegara Indonesia? Bagimana effecnja nanti kepada massa Peranakan, apa bila ini kedjadian?”

Sambil sama-sama doedoek di ubin dimuka rumahnja (sekarang djadi kantoran Sulindo) ia djawab saja:

“Ach, itu kan urusan owee sendiri. Laen orang djangan meniru-niru, apa jang owee bisa lakukan mungkin orang laen tida bisa. Buat kebanyakan Peranakan mereka sebaiknja tetep Warganegara Indonesia. Kalau dengan owee, owee sebetulnja ‘mendongkol’ ada setengah orang jang menjangka bukan-bukan sama owee. Kalau sesudahnja segala djasa owee dalem gerakan Nasional tida dihargai lagi, ja sudahlah, masa owee tida boleh pergi kemana owee suka? Sebetul'nja owee tjuma setengah maen-maen akibat ini rasa mendongkol'nja owee, maka diwaktu hari ulang taon'nja Tiongkok, owee kibarken sekali bendera Tiongkok. Kalau dengan ini orang mengira owee bukan orang Indonesia lagi, ja biarin sadja.”¹⁵⁹

Kekecewaan Liem terhadap pemerintah RIS akibat kebijakan yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa bukanlah satu-satunya penyebab Liem menanggalkan kewarganegaraan Indonesiannya. Dalam surat Tjoa Tjie Liang kepada Soe Hok Gie, tampak bahwa Liem marah karena pemerintahan Sukiman telah membuat tuduhan yang mengada-ada dan meragukan kesetiiaannya kepada Indonesia. Ditambah lagi kondisi kesehatannya tengah menurun dan menjadi semakin buruk akibat pelayanan yang kurang memadai di dalam penjara. Ia akhirnya mengambil

¹⁵⁹ Surat Tjoa Tjie Liang kepada Soe Hok Gie tanggal 5 Juli 1965 sebagaimana dikutip dalam psmti-pusat.org/id/tokoh/liem-koen-hian/ diakses pada 27 April 2012 pukul 16.30.

keputusan secara emosional tanpa pikir panjang untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia sebagai bentuk kekesalannya. Pilihan akhir Liem Koen Hian ini merupakan akhir dari perjuangan Liem mewujudkan *Indonesierschap*.



BAB V

SIMPULAN

Pergulatan pemikiran Liem Koen Hian dari nasionalisme Cina hingga nasionalisme Indonesia merupakan sebuah proses pencarian identitas seorang Tionghoa peranakan di tengah perubahan-perubahan zaman yang melingkupi lingkungannya. Sebagai bagian dari golongan Tionghoa peranakan yang merupakan “minoritas perantara” di Hindia Belanda, Liem Koen Hian sadar betul akan kedudukan orang Tionghoa yang sangat rentan di dalam masyarakat. Jaminan atas keamanan dan kedudukan yang layak bagi golongan peranakan Tionghoa adalah dasar perjuangan Liem.

Pada awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial menerapkan kebijakan-kebijakan yang membatasi mobilitas golongan Tionghoa, orang Tionghoa merasa pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak memberikan tempat yang layak bagi mereka. Di saat yang bersamaan, negeri Cina mulai merangkul orang Tionghoa di perantauan untuk membantu Cina melepaskan diri dari kungkungan bangsa-bangsa asing. Maka berpalinglah orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda pada negeri Cina yang dianggap mampu memberikan perlindungan untuk kedudukan dan kepentingan mereka. Nasionalisme Cina mencapai puncaknya di Hindia Belanda pada dua dasawarsa pertama abad ke-20. Golongan *Sin Po* yang mengkampanyekan orientasi ke Cina menjadi sangat kuat dan berpengaruh pada masa ini. Liem Koen Hian ikut terpengaruh kampanye golongan *Sin Po* ini, ia yakin bahwa hanya negeri Cina yang mampu memberikan keamanan dan kedudukan layak kepada Tionghoa peranakan di Hindia Belanda.

Di tahun 1920-an ketidakpuasan orang-orang Tionghoa terhadap pemerintah kolonial berkurang dengan dicabutnya peraturan-peraturan yang membatasi mobilitas golongan Tionghoa. Di samping itu, nasionalisme Indonesia semakin berkembang dengan pesatnya. Liem dengan jeli mampu melihat jauh ke depan, ia yakin suatu hari Indonesia akan merdeka. Nasionalisme Indonesia ini pun mempengaruhi Liem Koen Hian. Ia akhirnya menyadari bahwa negeri Cina

adalah negeri asing bagi Tionghoa peranakan, Indonesia yang merupakan tanah kelahiran dan tempat hidupnya yang seharusnya ia perjuangkan. Liem mulai mengubah orientasinya pada 1927 dari nasionalisme Cina menjadi nasionalisme Indonesia. Ia mencita-citakan sebuah negara Indonesia yang demokratis dan multikultur dimana golongan Tionghoa peranakan menjadi bagian utuh dari bangsa Indonesia, memikul hak dan kewajiban yang sama dengan golongan-golongan penduduk lainnya. Liem yakin nasib golongan Tionghoa peranakan akan menjadi lebih baik di alam Indonesia merdeka.

Liem memperjelas orientasi barunya ini pada 1930 dan memberinya nama *Indonesierschap*. Dalam konsep ini, kebangsaan Indonesia tidak ditentukan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu melainkan didasari oleh persamaan kepentingan dan cita-cita memperjuangkan Indonesia merdeka. Dengan demikian, tidak mustahil bagi Tionghoa peranakan untuk bergabung dalam kebangsaan Indonesia. Seorang Tionghoa pun dapat menjadi Indonesia jika dengan tulus mau ikut berjuang membangun Indonesia. Konsep *Indonesierschap* ini kemudian ia perjuangkan melalui PTI.

Setelah Indonesia merdeka, Liem tetap konsisten memperjuangkan cita-citanya untuk menjadikan kaum Tionghoa peranakan sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia. Namun Liem mendapati bahwa ternyata Republik Indonesia yang ikut ia perjuangkan tidak memberikan jaminan perlakuan yang adil bagi golongan Tionghoa. Liem yang humanis dan sangat membenci ketidakadilan merasa kecewa melihat praktik-praktik diskriminasi yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada golongan Tionghoa. Kekecewaan ini memuncak ketika Liem sendiri diperlakukan dengan tidak adil oleh pemerintah saat ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara selama dua setengah bulan tanpa pernah diperiksa ataupun diadili. Ia sangat sakit hati karena dituduh menjadi agen RRC oleh pemerintah RI pada masa itu. Akhirnya Liem mengambil keputusan yang bersifat emosional untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia.

Konsep *Indonesierschap* akhirnya gagal diwujudkan oleh Liem Koen Hian. Konsep *Indonesierschap* yang digagas Liem sebenarnya memang tidak aplikatif untuk negara seperti Indonesia. Dalam pemikiran Liem, negara Indonesia yang

Universitas Indonesia

akan terbentuk adalah negara demokratis yang multikultur seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai “Negara Bumiputra” (*Indigenous State*) berbeda dengan Amerika Serikat yang termasuk “Negara Imigran” (*Immigrant State*). Konsep kebangsaan kedua negara ini pun berbeda, Negara Bumiputra lebih berdasarkan *ethno-nation* (bangsa berdasarkan rasa atau etnis) sedangkan Negara Imigran lebih condong kepada *social-nation* (bangsa berdasarkan ras atau multietnis). Sebenarnya konsep bangsa Indonesia juga bukan berdasarkan *ethno-nation* karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Namun dalam masalah Tionghoa, konsep bangsa itu lebih dekat dengan pada *ethno-nation* sebab yang dititikberatkan adalah kebumiputraannya. Dalam arti ini, konsep bangsa Indonesia lebih berdasarkan pada ras atau etnis. Orang Tionghoa harus meleburkan diri ke dalam masyarakat bumiputra Indonesia, yaitu menjadi bumiputra (atau salah satu suku bangsa bumiputra), barulah orang itu menjadi bangsa Indonesia yang lengkap. Inilah kelemahan mendasar gagasan *Indonesierschap*, konsep kebangsaan Indonesia yang dibangun Liem Koen Hian didasari oleh *social-nation* padahal Indonesia termasuk *Indigenous State*.

Semasa Liem masih hidup, gagasan *Indonesierschap*-nya hanya dianut sebagian kecil kaum peranakan Tionghoa. Golongan Tionghoa umumnya takut untuk terlibat politik sehingga pengaruh pemikiran Liem menjadi sangat terbatas. Sangat terbatasnya pengaruh pemikiran Liem ini dapat dilihat dari kekuatan PTI yang hingga runtuhnya Hindia Belanda hanya memiliki pengaruh cukup kuat di Surabaya. Namun gagasan *Indonesierschap* dan PTI yang didirikan atas inisiatif Liem mengubah pandangan banyak kaum nasionalis Indonesia. Keberadaan PTI yang turut aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menghapuskan kesan bahwa orang-orang Tionghoa hanyalah kaum oportunistis yang pro-Belanda. Soetomo dan Thamrin pernah memperjuangkan dibukanya keanggotaan Parindra bagi kaum peranakan Tionghoa karena melihat kesungguhan Liem dan PTI dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Amir Syarifuddin, kawan dekat Liem yang merupakan tokoh Gerindo, juga berusaha membuka keanggotaan Gerindo bagi golongan peranakan Tionghoa karena pengaruh Liem (ketika pada 1939 Gerindo membuka keanggotaannya untuk orang-orang Tionghoa peranakan, Liem segera bergabung). Dari PTI pula muncul tokoh-tokoh Tionghoa peranakan yang

Universitas Indonesia

aktif di era kemerdekaan Indonesia seperti Tan Po Goan, Siauw Giok Tjhan, Tjoa Siek Ien, Tan Ling Djie, Oei Gee Hwat, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa Liem adalah tokoh yang melahirkan banyak tokoh. Liem Koen Hian telah meletakkan salah satu dasar bagi bergabungnya golongan peranakan Tionghoa dalam kebangsaan Indonesia. Setelah meninggalnya Liem, semakin banyak peranakan Tionghoa yang mengidentifikasi dirinya dengan kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Liem tetap hidup bahkan setelah kematiannya.



DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Djawa Tengah, 11 Oktober 1932.

Djawa Tengah, 12 Oktober 1932.

Keng Po, 29 Januari 1925

Mata Hari, 8 September 1934.

Sin Tit Po, 2 April 1930.

Sin Tit Po, 7 April 1930.

Sin Tit Po, 9 April 1930.

Sin Tit Po, 10 April 1930.

Sin Tit Po, 11 April 1930.

Sin Tit Po, 14 April 1930.

Sin Tit Po, 25 Agustus 1932.

Sin Tit Po, 26 Agustus 1932.

Sin Tit Po, 27 Agustus 1932.

Sin Tit Po, 6 September 1932.

Sin Tit Po, 10 September 1938.

Sin Tit Po, 15 Oktober 1938.

Sinar Sumatra, 3 Februari 1919.

Sinar Sumatra, 4 Februari 1919.

Sinar Sumatra, 5 Februari 1919.

Soeara Publiek, 27 Juli 1927.

Soeara Publiek, 28 Juli 1927.

Soeara Publiek, 10 Januari 1928.

Soeara Publiek, 2 Februari 1928.

Soeara Publiek, 20 Februari 1928.

Soeara Publiek, 22 Februari 1928.

Karya Tidak Diterbitkan

Priyanto Wibowo, "Tionghoa Bagian dari Masyarakat Multikultural Indonesia: Sebuah Perspektif Historis." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Masyarakat Tionghoa Bagian dari Masa Depan Indonesia", Restaurant Nelayan, Jakarta, 15 Mei 2011.

Buku

- Abdullah, Taufik, dan Abdurrachman Surjomihardjo, *ed.* 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Aji, R. N. Bayu. 2010. *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola*. Yogyakarta: Ombak.
- Alhaziri, Wasmi, *ed.* 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Anderson, Ben. 1988. *Revoloesi Pemoeda*. Jakarta: Sinar harapan.
- Carey, Peter. 2008. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Cincotta, Howard, *ed.* 2008. *Garis Besar Sejarah Amerika*. Jakarta: USIS.
- Dita Z., Ainin, *ed.* 2010. *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Foulcher, Keith. 2008. *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Geertz, Clifford. 1983. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Komandoko, Gamal. 2008. *Boedi Oetomo*. Jakarta: Media Pressindo.
- Kusuma, Ananda B. *ed., et. al.* 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Lapian, A. B. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Leirissa, R. Z. 1985. *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lohanda, Mona. 2007. *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

- Malik, Adam. 1982. *Riwayat Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Widjaya.
- Manus, M. P. B., *et. al.* 1993. *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moeliono, Anton M., *ed., et. al.* 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noordjanah, Andjarwati. 2010. *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nordholt, Henk S., *ed.* 2005. *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. Yogyakarta: LKiS.
- Notosusanto, Nugroho. 1979. *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Arifin S., dan Ipong Jazimah. 2011. *Detik-Detik Proklamasi: Saat-saat Menegangkan Menjelang Kemerdekaan Republik*. Yogyakarta: Narasi.
- Onghokham 1989. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rizal, J. J., *ed.* 2005. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Setiono, Benny G. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- Shiraishi, Takashi. 2001. *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Belanda*. Yogyakarta: LKiS.
- Suryadinata, Leo, *ed.* 2005. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 – 2002*. Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata, Leo. 1994. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo. 1984. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafitipers.
- Tan, Melly G. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Van Niel, Robert. 2009. *The Emergence of the Modern Indonesian Elite, atau Elite Modern Indonesia*, terj. Jakarta: Pustaka Jaya.

Verdiansyah, Chris, ed. 2007. *Jalan Panjang Menjadi WNI*. Jakarta: Kompas.

Wilson. 2008. *Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Publikasi Elektronik

psmti-pusat.org/id/tokoh/liem-koen-hian/ diakses pada 27 April 2012 pukul 16.30.



Lampiran 1

“Ka Indoneserschap”. *Sin Tit Po*, 2 April 1930.



Lampiran 2

“Tionghoa Peranakan Djadi Indonesier”. *Soeara Publiek*, 20 Februari 1928.



Lampiran 3

“Partij Tionghoa Indonesia”. *Sin Tit Po*, 6 September 1932.



Lampiran 4

“Paham Kita”. *Sin Tit Po*, 15 Oktober 1938.



Lampiran 5

“Haloean Kita V”. *Sin Tit Po*, 14 April 1930.



Lampiran VI

“Oendang Oendang Karahajatan Olanda”. *Sinar Sumatra*, 3 Februari 1919.



Lampiran 7

Foto Liem Koen Hian

